



MEMAKNAI ETIKA PROFESI AKUNTAN INDONESIA DENGAN PANCASILA

**Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Bidang Etika Bisnis dan Profesi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya**



Oleh:

UNTI LUDIGDO

**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT TERBUKA
SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA
24 APRIL 2012**

Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum wr.wb.

Yang terhormat:

Rektor/Ketua Senat Universitas Brawijaya,
Anggota Senat Universitas Brawijaya,
Pimpinan universitas, fakultas, jurusan, program studi dan lembaga di lingkungan Universitas Brawijaya,
Para kolega dosen, pimpinan penunjang akademik dan segenap sivitas akademika Universitas Brawijaya,
Para undangan, serta
Para hadirin dan handai taulan yang dirahmati Allah SWT...

Mengawali pidato ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk bersama-sama kembali memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan berkah dan rahmat kepada kita semua. Semoga sholawat tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan salam terkirim kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,
Mengiringi kebahagiaan saya pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan yang berjudul "Memaknai Etika Profesi Akuntan Indonesia dengan Pancasila."

I. Latar Belakang

Telah diketahui oleh khalayak bahwa akuntan Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peran individual dan kolektif akuntan

antara lain dilakukan dalam kaitannya dengan penciptaan iklim bisnis yang sehat serta penguatan penatalaksanaan keuangan negara yang semakin transparan dan akuntabel.

Dalam penciptaan iklim bisnis yang lebih sehat, akuntan berperan baik dalam penguatan sistem akuntansi perusahaan maupun dalam pengalokasian sumberdaya perusahaan secara lebih efisien. Pada aspek kebijakan profesi, adopsi dan implementasi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) telah berhasil dilaksanakan. Diharapkan dengan adopsi ini laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai daya banding dan daya akses dalam lingkungan bisnis global. Ini merupakan hal penting karena dunia usaha Indonesia membutuhkan hadirnya investor global, dan investor global sangat berkepentingan dengan berbagai potensi yang ada di Indonesia.

Dalam peningkatan daya saing perusahaan, peran akuntan manajemen yang bertanggung jawab atas perencanaan dan alokasi sumberdaya keuangan juga semakin teruji. Implementasi sistem akuntansi yang andal dan kredibel telah menentukan kesehatan perusahaan dikarenakan informasi yang dihasilkannya dapat menunjukkan ketepatan rencana dan alokasi sumberdaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Demikian halnya ketika akuntan yang bertindak sebagai auditor internal menjalankan fungsinya dengan tepat, maka proses akuntansi akan berlangsung dengan baik dan pelaporan keuangan entitas menjadi lebih kredibel.

Peran akuntan dalam penatalaksanaan keuangan negara juga meningkat seiring dengan kebijakan politik pemerintah untuk mendesentralisasi keuangan ke daerah sejak tahun 2001, dalam mana perbantuan teknis pengelolaan keuangan daerah

banyak dilakukan oleh akuntan yang bekerja baik sebagai akademisi, auditor negara (BPK) maupun akuntan publik atau konsultan. Dalam kurun waktu yang bersamaan, reformasi sistem akuntansi pemerintahan berlangsung. Dalam proses ini terjadi transformasi sistem akuntansi sektor publik, dari yang semula *cash basis* ke *modified cash basis* dan dari *single entry* ke *double entry*. Proses ini diperkuat dengan lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada tahun 2005 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada tahun 2007.

Tidak dapat dipungkiri bahwa baiknya peran akuntan di atas dan munculnya tokoh-tokoh akuntan dalam berbagai posisi penting di lembaga pemerintahan dan lembaga tinggi negara, ternyata masih diikuti oleh terjadinya penyimpangan perilaku dari sebagian akuntan lainnya. Mereka sangat permisif dan toleran terhadap pelanggaran moral dan hukum, serta kemudian menjadi *the black public figure*. Sekedar sebagai contoh, munculnya sosok Gayus H. Tambunan (kasusnya mencuat tahun 2011 dan sampai saat ini masih dalam proses peradilan) serta kemudian mencuatnya nama Dhana Widyatmika di berbagai media nasional di awal tahun 2012 dalam kasus perpajakan, seakan mengisi kembali episode buruk dunia profesi akuntansi di Indonesia. Terjadinya kasus perpajakan seperti ini tentu tidak lepas dari peran berbagai pihak, misalnya internal perusahaan yang melibatkan akuntan manajemen yang menangani akuntansi dan perpajakan perusahaan, konsultan perpajakan ataupun kemungkinan akuntan publik.

Dalam konteks yang lain, Ahmadi Hadibroto¹, mantan Ketua Umum IAI dan anggota *IFAC Board* 2011-2014,

¹ Akuntan Indonesia Edisi Khusus Ulang Tahun IAI, 23 Desember 2011; 24.

mengatakan bahwa Bappepam-LK telah menemukan banyak pelanggaran atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada laporan keuangan 2010 yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik, di mana mereka telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari akuntan publik. Hal demikian tentunya menimbulkan tanda tanya besar terhadap integritas dan profesionalisme akuntan dalam menjalankan tanggung jawab keprofesiannya. Paparan ini mengingatkan kembali pada kasus-kasus pengabaian moralitas profesi yang melibatkan beberapa orang akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) pada awal tahun 2000an, di mana mereka terlibat baik pada kasus audit maupun perpajakan (lihat Ludigdo, 2007; 11-12).

Bagaimanapun kasus-kasus ini terjadi karena pada saat bersamaan lingkungan bisnis dan sosial yang melingkupi profesi akuntan di Indonesia masih kurang kondusif bagi berkembangnya praktik profesi yang sehat. Profesi akuntan bekerja dalam suatu lingkungan yang luas, dan dalam banyak hal hanya merupakan suatu subordinat/subsistem dari suatu sistem bisnis dan sosial yang besar.

“Memperhatikan kondisi yang ada, betapa tidak mudahnya akuntan untuk menempatkan diri sebagai profesional yang bersih dari berbagai perilaku menyimpang. Dalam konteks yang demikian, sekaligus dapat ditunjukkan adanya struktur dominasi (*terhadap penciptaan perilaku akuntan*) yang bersifat makro-sosial, yaitu kondisi sosial masyarakat itu sendiri (Ludigdo, 2007; 198).”

Meskipun kasus dan situasi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, dan bahkan skala dan dampaknya pun jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang terjadi di Amerika Serikat², namun tetap saja menimbulkan suatu keprihatinan. Keprihatinan ini terutama terkait dengan kenyataan bahwa akuntan Indonesia sudah memiliki kode etik, bahkan sudah ada sejak awal tahun 1974 bersamaan dengan kodifikasi Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA) dan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Keberadaan kode etik ini kemudian disempurnakan pada tahun 1998 di saat kongres Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kemudian pada tahun 2011, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengadopsi dan menerapkan secara penuh *Code of Ethics for Professional Accountants* yang dikeluarkan oleh *International Federation of Accountants' Ethics Committee* tahun 2005 sebagai kode etikanya.

Dalam realitasnya keberadaan kode etik ini seolah belum memiliki arti yang sesungguhnya bagi kalangan akuntan Indonesia. Kode etik masih hanya menjadi “hiasan” profesi yang tanpa makna, baik dalam ranah pemikiran maupun tindakan keseharian para akuntan. Bahkan kode etik ini merupakan sesuatu yang jauh dari jangkauan idealisme akuntan.

Situasi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Mengapa demikian, karena kode etik ataupun kode perilaku merupakan kodifikasi standar nilai profesi yang wajib dipatuhi. Masyarakat percaya kepada akuntan karena akuntan bekerja berlandaskan pada suatu standar nilai. Standar nilai profesi ini merupakan kristalisasi nilai-nilai adiluhur yang ada dan

² Perhatikan kasus *Enron Corp.* dan *Arthur Anderson Accounting Firm* yang sangat fenomenal dan mencuat pada tahun 2001-2002.

berkembang dalam suatu masyarakat yang dianggap cocok untuk diadopsi suatu profesi.

Namun demikian seharusnya disadari bahwa kristalisasi nilai-nilai ini diperoleh melalui pemikiran sekelompok ahli dalam profesi tersebut. Tentunya ahli-ahli ini bukanlah manusia yang bebas nilai dan kepentingan. Pemikiran sekelompok ahli tersebut selalu disemangati dan didasarkan pada asumsi–asumsi budaya, ekonomi dan politik yang melingkupi mereka, serta tentu bias kepentingan ideologis mereka (Baker, 2005). Oleh karena itu adopsi penuh standar etika dari negara lain maupun organisasi internasional, sebagaimana yang hampir selalu dilakukan profesi akuntan di Indonesia selama ini, bukanlah langkah terbaik untuk mengembangkan perilaku etis akuntan Indonesia. Atas dasar itu dan dalam suasana kebangsaan yang memerlukan penyemangat untuk bangkit dari keterpurukan akibat isu korupsi yang akut dan melemahnya kebanggaan atas Indonesia, penyampaian gagasan tentang pemaknaan etika akuntan dengan cara pandang Pancasila yang disemangati oleh spirit ketuhanan ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Selain hal di atas penyampaian gagasan ini menguat kembali seiring dengan kegelisahan diri penulis memperhatikan gegap gempitanya profesi akuntan menyambut berbagai standar baru yang dikeluarkan oleh *International Federation of Accountant* (IFAC) dalam kerangka globalisasi berbagai standar akuntansi dan profesi. Ini karena suasana yang dirasakan adalah peminggiran atau pengerdilan nilai-nilai luhur Indonesia di dalamnya. Di sini seolah berkembang anggapan tiadanya nilai-nilai Indonesia yang dapat dipromosikan untuk kepentingan profesi yang terlahir, bertunas dan berkembang

dari dan untuk bangsa ini. Demikian halnya, untuk siapakah sebenarnya berbagai standar profesi diadopsi dan ditegakkan? Kegelisahan tersebut bertali kelindan dengan kegelisahan lainnya, sudahkah bangsa ini sedemikian lemahnya untuk menjaga eksistensinya di tengah persaingan global, sehingga harus terus menerus mengikuti (“didikte” oleh) bangsa lain untuk mencapai kemajuannya. Lalu di manakah jejak-jejak sejarah kecemerlangan dan kebesaran bangsa ini?

Telah dipahami bersama bahwa Indonesia memiliki dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang hebat karena dapat menjadi perekat untuk kesatuan wilayah yang terpecah-pecah dalam gugusan pulau-pulau dengan keragaman etnisnya. Lalu di manakah keberadaan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa ini dalam ranah profesi akuntan?

Penulisan naskah ini merupakan upaya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Untuk kepentingan ini, penulisan naskah dilakukan secara refleksif, yaitu menggabungkan berbagai wacana dan pendapat yang ditemukan pada berbagai literatur, serta pengetahuan dan keyakinan penulis tentang Pancasila, ketuhanan dan etika akuntan. Ini kemudian diperkaya dengan data-data yang didapatkan melalui dialog langsung maupun tertulis di dalam kelas-kelas S1, S2, S3 dan PPAk Program Studi Akuntansi FEB-UB, maupun data-data yang didapatkan melalui milist anggota IAI dan media jejaring sosial lainnya.

Namun demikian perlu dipahami di awal bahwa dalam naskah ini tidak diurai dan dikritisi satu per satu berbagai prinsip dan pernyataan kode etik akuntan yang ada. Penulisan ini lebih diarahkan untuk menemukan jiwa/ruh etika profesi akuntan Indonesia, yang diharapkan kemudian dapat

diturunkan dalam berbagai prinsip dan atau pernyataan etika di dalam kode etik akuntan Indonesia. Untuk ini kelak harus dilakukan suatu kajian akademik yang lebih intensif.

Selanjutnya, pidato pengukuhan ini diharapkan dapat menggugah kesadaran intelektual dan moral para akademisi dan praktisi akuntansi, serta akademisi lainnya, untuk bersama-sama merevitalisasi dan menggali kembali khasanah nilai-nilai kebangsaan yang telah ditanam oleh para pendiri bangsa dan kemudian mengimplementasikan untuk diri dan masyarakat serta kemudian bermanfaat untuk kemaslahatan semesta.

II. Menghadirkan Pancasila di Tengah Globalisasi Profesi

Bapak Rektor, Anggota Senat serta hadirin yang terhormat.

Mengaitkan Pancasila dengan etika profesi akuntan, khususnya mengadopsinya dalam kode etik, sangatlah tidak populer di kalangan akuntan dan bahkan dapat menjadi *guyonan* karena jelas melawan arus ideologi besar dunia dewasa ini. Terlebih lagi, seiring dengan tumbanganya orde baru melalui gerakan reformasi 1998, Pancasila seolah telah turut lenyap dari belantara kehidupan di bumi Indonesia. Bahkan Pancasila telah menjadi ideologi asing bagi banyak kalangan, khususnya generasi muda Indonesia. Oleh karena itu relevankah dalam konteks kekinian menanyakan dan mendiskusikan Pancasila di dalam kelas-kelas akuntansi? Elokkan mengangkat tema-tema yang bernuansa Pancasila dalam ranah profesi yang telah sedemikian mengglobal? Tepatkah diskursus etika dalam profesi akuntansi dikaitkan dengan sebuah ideologi dari bangsa dan negara yang martabatnya sedang terpuruk ini?

Ketika penulis secara spontan bertanya kepada seorang mahasiswa kelas Etika Bisnis dan Profesi PS-1 Akuntansi FEB Universitas Brawijaya³, “Apakah Pancasila itu?” Si mahasiswa tidak mampu menjelaskan dengan tangkas dan tepat. Celaknya ketika pertanyaan ini dilanjutkan kepada mahasiswa lain untuk menyebutkan sila-sila dalam Pancasila, dengan gugup si mahasiswa tersebut menyebutkannya secara *belepotan*.

Beberapa dialog dalam milist anggota IAI antara 20 April – 2 Mei 2011 menggambarkan adanya kontroversi pandangan di antara para akuntan untuk mengaitkan Pancasila dengan etika akuntan. Sebagian tidak setuju dengan pandangan tersebut, meski sebagian besar lainnya sangat respek dan melontarkan gagasan-gagasan positifnya. Salah satu pandangan yang tidak setuju atas pengaitan Pancasila dengan etika akuntan disampaikan oleh Prof. Wahyudi Prakarsa, seorang akuntan senior dan Guru Besar Akuntansi di Universitas Indonesia:

“Ditinjau dari segi politik, Pancasila merupakan *philosophical foundation* resmi yang hanya berlaku di RI. Sedang kode etik akuntan bersifat universal, berlaku di seluruh dunia. Kalau demikian apa manfaatnya kode etik Pancasila kalau hanya berlaku di Indonesia, meskipun saya yakin rumusannya tidak akan dan tidak boleh menyimpang dari kode etik akuntan yang bersifat universal. Seandainya yang Anda gali dari Pancasila (misalnya asas kekeluargaan) menyimpang dari

³ Dialog dilakukan dalam sebuah sesi perkuliahan pada Semester Genap 2010/2011.

kode etik akuntan yang universal (misalnya *Objectivity*), dampaknya akan sangat luas. Laporan Keuangan yang diaudit oleh akuntan yang berpegang pada kode etik yang menyimpang ini tidak akan diterima di semua pasar modal di seluruh dunia.”

“Peran akuntan dalam konteks kebangsaan hanya relevan dalam perekonomian yang tertutup. Dalam perekonomian terbuka yang sedang berlangsung belakangan ini, peran akuntan dalam konteks kebangsaan tidak relevan lagi. Yang relevan adalah peran akuntan dalam konteks global. Karena itulah maka Pak Ahmadi tempo hari mencanangkan konvergensi IFRS 2012. Nah, kalau demikian apakah pemikiran untuk memasukkan Sila Pertama dalam kode Etik Akuntan mungkin dilakukan misalnya di RRT dan Rusia yang belakangan ini perekonomiannya maju pesat tak tertandingi? Saya lebih setuju dengan pendapat Pak Mustofa bahwa agama adalah urusan kita masing-masing dengan Tuhan. Dalam *civil society*, menanyakan agama seseorang adalah tabu, setiap orang akan menjawab *"It is not your business!"* Nah mana mungkin kita bicara mengenai kebangsaan kalau agama harus dicantumkan dalam kartu penduduk? Di FB ada gerakan untuk menghapus kewajiban mencantumkan agama dalam kartu penduduk, saya adalah salah satu pendukungnya karena saya yakin merupakan salah satu faktor yang membuat Indonesia amburadul.”

Demikian halnya dengan Drs. Mustofa, akuntan senior pendiri salah satu *The Big Four Accounting Firm* di Indonesia dan Pendiri Jurusan Akuntansi FEB Universitas Brawijaya, menyampaikan pandangannya:

“Saya tidak meragukan nilai luhur Pancasila, tetapi yang kita lihat bagaimana penerapannya di negara kita? Selama label *gak* disebut sebenarnya sama saja dengan etika yang sama-sama universal. Masalah unsur keTuhanan menurut saya itu urusan pribadi umat dengan sang Khaliq.”

“Saya *kok* sependapat dengan Pak Wahjudi. Kehidupan profesi akan lebih baik diatur dengan etika profesi yang universal. Pancasila biarkan untuk dasar negara dan politik kebangsaan. Diskusi seperti ini akan panjang sama halnya dengan mendiskusikan pilihan ekonomi kerakyatan, ekonomi pancasila, kapitalisme, ekonomi berkeadilan sosial, ekonomi pembangunan dan semuanya kita tahu ujung-ujungnya menuju kesejahteraan masyarakat.”

Sementara itu beberapa pandangan yang mendukung atas pengaitan etika akuntan dengan Pancasila ini antara lain berasal dari Drs. Zaenal Soedjais, seorang akuntan senior dan mantan Ketua Umum IAI. Dia memaparkan pandangannya secara ringan menanggapi pendapat-pendapat yang berkembang dalam milist tersebut, dalam suatu bentuk dialog imajiner dengan Gus Dur sebagaimana berikut ini:

“... Saya jadi tergelitik juga untuk *sharing*. Terutama pernyataan Cak Mus terakhir. Di mobil di kemacetan Jakarta saya tertidur, mimpi ketemu Gus Dur. Aku sampaikan kegalauan beberapa Akuntan perkara penerapan Perilaku Etis Akuntan Indonesia yang *totally copying International standards*, sementara kita punya Pancasila, yang sarat dengan pokok-pokok etika kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Gus Dur bilang begini: *Djais, opo ono sih barang sing sampurno? International standards opo wae rak mesthi onok revisi, gak pernah leren. La nek pancen Perilaku Etika Akuntan sing jarene universal iku onok sing kudu ditambah dipoles, ngacu maring Poncosilo lan liyo liyane, yo apa salahe disempurnaake digawe luwih becik. Aja ming copy paste duweke wong Londo, gak isin tah kowe Is...ngono wae kok repot.*

Lantas saya tanya Gus Dur *comment*-nya terhadap pernyataan Cak Mus, bahwa masalah KeTuhanan itu masalah pribadi, Gus Dur menjawab *enteng*: *Pendapate Cak Mus iku yo gak salah, nek sing dimaksud ketuhanan iku soal Shalat. Mosok sih onok aturan Akuntan muslim kudu shalat? Pencantuman kata-kata berazaskan Tuhan YME janjane merupakan ungkapan merendahkan diri, nek kowe, aku, kabeh umat iki cilik mentik, gak ana apa-apano dibanding Gusti Allah... Ojo mbok artikno kon shalat Is.. Cobo deloken nang duit Dollar Amerika, cermati onok kata-kata IN GOD WE TRUST ... La wong Londo wae ora alergi nyebut Gusti Allah malah Cak Mus anake Kiyai ogah...kandani yo. Ojo dumeh...aya-aya wae hehehe.*

Is, Djais, kandani para akuntan konco-koncomu, ojo bengkerengan soal atribut Etika, sing penting kabeh akuntan bersumpah commit ngelakoni apa wae sing becik...aja niru-niru si Gayus lan MD, pingin enggal sugih cukup modale ming dengkul, malah dengkule wong liyo sing dienggo.....ora selamat kon hehehe

Itulah mimpi saya diskusi sama Gus Dur. Kalau ada yang *ngga*’ puas silahkan datang atau nyusul beliau *yaah...*”

Mencermati pandangan kontra di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa mereka baru menempatkan Pancasila sebagai isu politik kebangsaan. Pancasila masih ditempatkan pada isu yang terkait dengan politik identitas nasional, bukan sebagai pandangan hidup bangsa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pandangan itu maka Pancasila tidak dapat dibawa dalam ranah kehidupan kebangsaan lainnya, termasuk dalam ranah profesi. Pandangan yang demikian bersifat isolatif, di mana Pancasila hanya dirujuk dan diwujudkan dalam lingkup yang terbatas dari perikehidupan kebangsaan yang sangat luas ini. Padahal seperti disampaikan oleh Asshiddiqie (2011), merujuk pada rekomendasi Kongres Pancasila II, upaya pembudayaan Pancasila dapat diwujudkan secara konkrit dalam praktik kehidupan masyarakat, antara lain melalui perumusan kode etik dan kode perilaku beserta pelembagaan institusi penegaknya di lingkungan jabatan kenegaraan, pemerintahan, ormas, LSM dan Badan Usaha.

Latif (2011; 41-42) mengemukakan bahwa Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan

ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat dalam mana setiap sila memiliki justifikasi historis, rasional dan aktual yang dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten sehingga dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.

Bagaimanapun kehidupan profesional akuntan berada dalam spektrum kebangsaan meskipun mereka juga dapat bekerja dalam lingkup global. Profesi akuntan adalah bagian dari masyarakat sosial suatu bangsa, yang dengan identitas kebangsaan yang melekat pada dirinya tetap memungkinkan ia untuk berkiprah dalam institusi global. Di Amerika Serikat ada *AMERICAN Accounting Association* (AAA) atau *AMERICAN Institute of Certified Public Accountant* (AICPA), dalam mana anggotanya (mayoritas) adalah akuntan warga masyarakat Amerika yang berikrar setia pada nilai-nilai Amerika, dan secara organisatoris juga mengusung nilai-nilai Amerika. Terkait dengan ini, Baker (2005) serta Dwyer dan Alon (2008) menunjukkan bahwa AICPA secara jelas mengusung ideologi neo-liberalisme yang sarat nilai-nilai komersialisme. Sementara di Indonesia ada Ikatan Akuntan INDONESIA (IAI), Institut Akuntan Publik INDONESIA (IAPI), atau Institut Akuntan Manajemen INDONESIA (IAMI) yang anggotanya adalah warga Indonesia yang seharusnya berikrar setia pada cita-cita dan nilai-nilai Indonesia dan secara organisatoris juga seharusnya memperjuangkan cita-cita dan nilai-nilai Indonesia. Bagaimanapun keberadaan IAI dalam *International Federation of Accountant* (IFAC) adalah bersifat federatif, yang basisnya tetaplah identitas kebangsaan Indonesia dengan segala atribut dan nilai-nilainya, sebagaimana keberadaan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Situasi yang menganggap bahwa yang dari luar dan kemudian dilegitimasi sebagai universal adalah yang terbaik, menunjukkan lemahnya profesi akuntan menghadapi tekanan gerakan para kapitalis global yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan diri dengan kepuasan yang bersifat materi. Ludigdo (2007; 211) menyampaikan pandangannya:

”Profesi akuntan, dengan cara pandang bisnis dan ekonomi yang melingkupinya, telah menempatkan profesionalismenya pada kepentingan propaganda kapitalisme. Dalam banyak area aktifitasnya, profesional akuntan akan lebih mementingkan hasrat pencapaian keuntungan materialnya secara maksimal daripada pencapaian kebahagiaan hidup yang hakiki sebagai manusia. Konstruksi budaya yang mementingkan pencapaian kekayaan materi inilah yang menjiwai praktik kehidupan sehari-hari sebagian besar akuntan.”

Berkaca dari pandangan yang demikian, tepatkah sikap selalu mengagungkan “nilai-nilai” dan produk-produk global yang distempel universal oleh para kapitalis dan pendukung-pendukungnya? Di rumahnya sendiri, dalam beberapa bulan terakhir ini penentangan terhadap kapitalisme-neoliberalisme itu sedang gencar terjadi? Sikap penentangan ini antara lain berupa gerakan anti Wallstreet yang terjadi secara masif dan meluas ke berbagai kota di Amerika Serikat dan kemudian menjalar ke Kanada. Mereka mengusung slogan “*Occupy Wallstreet*” dan “*Occupy Canada.*” Oleh para aktifisnya gerakan ini diharapkan dapat mengubah pola pikir pemerintah dan korporasi yang dianggap sebagai biang bencana ekonomi

dunia yang kemudian mengakibatkan merosotnya kesejahteraan masyarakat luas. “Kami ingin berkumpul bersama untuk mengatakan bahwa di dunia yang serba kaya ini, seharusnya tidak ada disparitas ekonomi. Tidak perlu ada banyak orang yang miskin”, ujar Katie Harris seorang mahasiswa doktoral salah satu universitas di Kanada⁴.

III. Etika Akuntan Indonesia dalam Cara Pandang Pancasila

Bapak/Ibu/sdr. hadirin yang mulia.

Sebagaimana telah disebutkan, Pancasila jika dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten akan dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa. Pandangan seperti ini dapat diterjemahkan dalam konteks profesi akuntan, di mana sila-sila Pancasila akan menginspirasi berkembangnya pandangan dan perilaku etisnya sehingga berkontribusi dalam pencapaian keagungan peradaban bangsa. Kajian etika akuntan berbasis Pancasila telah dilakukan sebelumnya oleh Ludigdo dan Kamayanti (2012), dengan menempatkan Pancasila sebagai pembebas etika akuntan dari hegemoni nilai-nilai barat. Untuk melanjutkan dan menyempurnakan kajian sebelumnya, pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila (Latif, 2011; 42-48) digunakan sebagai kerangka diskusinya. Dalam naskah ini uraian pokok-pokok moralitas Pancasila dikembangkan untuk profesi akuntan dengan mengaitkan pada Anggaran Dasar IAI (sebagai

⁴ www.erasuslim.com, 14 Oktober 2011.

dokumen dasar pengembangan profesi secara keseluruhan), Prinsip-prinsip Etika Akuntan yang termaktub dalam Kode Etik IAI dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh IAPI (sebagai preferensi umum nilai-nilai profesi akuntan Indonesia).

Pertama: Cara Pandang Ketuhanan

Merujuk pada kode etik IAI dan IAPI, profesi akuntan Indonesia belum menjadikan ketuhanan dan nilai-nilai yang melekat di dalamnya sebagai preferensi etisnya. Pun demikian, di berbagai dokumen standar profesi lainnya dimensi ketuhanan belum ditemukan. Ini berangkat dari pola *fully adoption* kode etik dan pandangan etis akuntan Indonesia dari luar negeri (Barat) yang berlatar belakang sekuler atau mungkin ateis.

Dalam cara pandang Pancasila, nilai-nilai ketuhanan merupakan sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) bagi Bangsa Indonesia. Ini adalah suatu kenyataan sejarah dalam mana Tuhan telah “hadir” dalam ruang publik Nusantara, meski usaha-usaha untuk mencerabutnya pernah dilakukan oleh kolonialis Belanda. Ini menunjukkan bahwa sejarah panjang perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, banyak dilandasi oleh semangat keberagaman ini. Etos perjuangan para pendahulu bangsa yang sangat kuat dilandasi oleh semangat ketuhanan, antara lain dapat diperhatikan dalam pernyataan Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ...”, dan pekik gemuruh “Allahu Akbar” yang disuarakan oleh Bung Tomo

saat menggelorakan semangat juang rakyat pada perang kemerdekaan 10 Nopember 1945 di Surabaya.

Nilai-nilai ketuhanan merupakan sesuatu yang fundamental dan alamiah terdapat dalam kehidupan individu akuntan Indonesia untuk menjalankan tugas profesi dan menuntaskan visi hidupnya. Di alam Indonesia, Tuhan dianggap mempunyai peran penting untuk mempromosikan sikap dan perilaku etis akuntan. Untuk itu akuntan harus selalu didorong untuk menjaga komitmen dirinya kepada Tuhan dan kemudian menghasilkan sikap dan perilaku menghindari perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, serta sekaligus menyebarkan rahmat kepada semesta. Seharusnya dengan disemangati oleh nilai-nilai ketuhanan seperti ini, akuntan Indonesia akan merealisasikan berbagai prinsip dan aturan etika lainnya.

Menggambarkan situasi yang mana akuntan harus mendasarkan pikiran, sikap dan perilakunya pada kerangka ketuhanan, Prof. Moch. Syafruddin (Ketua Jurusan Akuntansi FEB Undip dan salah satu Ketua Bidang IAI Kompartemen Akuntan Pendidik)⁵ menyampaikan pandangannya:

“Jika yang kita (*baca akuntan*) tuju, cari, dambakan, yang merupakan visi hidup diri kita adalah Pencipta Diri (lawan dari materi apapun), yang kita peroleh adalah kepastian (kepastian hidup, sekaligus kepastian materi). Kebanyakan manusia berlaku tidak adil, bukankah materi yang disimbolkan terletak di perut dan bawah perut ada di posisi bawah, sedangkan Pencipta Diri kita disimbolkan fikiran, otak, hati, rasa yang terletak di atas,

⁵ Disampaikan dalam milist anggota IAI tanggal 11 Maret 2012.

kepala dan jantung. Namun kebanyakan kita mengutamakan yang di perut dan bawah perut (baca materi, jabatan, kekuasaan, kekayaan, seks)... Betapa tidak adilnya kita yang seharusnya mengutamakan Yang Di Atas, namun sebaliknya.”

Sangat penting untuk ditegaskan bahwa spirit ketuhanan haruslah menjadi pondasi Akuntan Indonesia dalam menjalankan aktifitas profesionalnya. Ketulusan akuntan dalam bekerja dan menunaikan tanggung jawab profesionalnya akan selalu didasari oleh keyakinannya untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Oleh karenanya maka penghindaran maupun pengingkaran terhadap nilai-nilai ketuhanan dalam berbagai bidang profesi akuntan, sejatinya adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar bangsa dan karakter asasi manusia Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pejuang dan pendiri bangsa.

Kedua: Cara Pandang Kemanusiaan

Kode etik akuntan dalam berbagai prinsip dan aturannya telah dengan baik menguraikan dimensi cara pandang kemanusiaan ini. Pengutamaan kepentingan publik merupakan terminologi yang sangat menonjol dalam elaborasi prinsip dan aturan etika. Terkait dengan ini Prinsip Kedua (01) Etika Profesi IAI mendefinisikan kepentingan publik sebagai “kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani oleh akuntan secara keseluruhan.” Disebutkan pula bahwa “tanggung jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja (06)”, sehingga kepentingan publik menjadi titik berat perhatian akuntan.

Meskipun demikian pemahaman atas terminologi ini harus diperkuat dengan cara pandang bahwa pengutamaan kepentingan publik ini adalah dalam kerangka perwujudan keadilan sosial dan pencapaian kemajuan peradaban dunia bukan pengertian yang terkooptasi kepentingan liberalis-kapitalis.

Dalam cara pandang Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai pondasi kehidupan Bangsa Indonesia untuk membangun relasi antar sesama dan antar bangsa. Nilai-nilai kemanusiaan ini bukanlah dalam pengertian sekedar mengikuti paham pengutamaan hak-hak individual (individualisme), namun harus disandarkan pada paham kekeluargaan. Menarik kembali mencerna pandangan para *founding fathers* yang disampaikan melalui pidato di sidang BPUPKI tanggal 10-15 Juli 1945. Soekarno menyatakan dengan tegas, “Jikalau betul-betul hendak mendasarkan negara pada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya.” Sementara itu Soepomo menyampaikan pandangannya, “Jadi jangan menyandarkan negara kita pada aliran perseorangan, akan tetapi pada kekeluargaan. Oleh karena menurut pikiran saya aliran kekeluargaan sesuai dengan sifat ketimuran.” Pandangan-pandangan yang demikian menunjukkan betapa keterbukaan pendiri bangsa terhadap asupan dari pelbagai konstitusi negara lain, tidak menyurutkan tekadnya untuk menyusun konstitusi yang cocok dengan tata-nilai masyarakat Indonesia sendiri (lihat Latif, 2011; 183 dan 186-187).

Dalam konteks ini akuntan perlu memahami prinsip kebangsaan yang luas melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi (Latif, 2011; 43). Dalam eksternalisasi, akuntan sepantasnya turut terlibat secara bebas dan aktif membangun ketertiban dunia (khususnya melalui pengembangan disiplin akuntansi dan praktik bisnis) yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam internalisasi, akuntan seharusnya mengembangkan disiplin akuntansi untuk memuliakan dan meningkatkan martabat penduduk negeri.

Dalam kerangka globalisasi akuntan harus berperan membangun peradaban dengan menjunjung tinggi keadilan. Keterlibatan akuntan dalam berbagai institusi global, tidak sepantasnya meninggalkan keluhuran nilai-nilai Indonesia. Bagaimanapun internasionalisasi profesi merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari oleh akuntan Indonesia, namun semangatnya harus untuk merealisasikan keadilan dan kesejahteraan bersama (khususnya bagi bangsa Indonesia). Oleh karenanya akuntan harus mengembangkan sikap kritis terhadap pelbagai aturan maupun standar yang berorientasi pada dominasi kapitalisme, liberalisme dan individualisme. Dengan alasan ini pula akuntan Indonesia tidak serta merta menerimanya sebagai aturan atau standar profesi akuntan Indonesia, meskipun dengan dalih sebagai keharusan internasional dan bersifat universal. Mengacu pada berbagai argumentasi penulis dan peneliti sebelumnya, Bakre (2008) mengemukakan:

“More recently the globalised pattern of capitalism and businesses has been accompanied by the emergence of particular financial reporting organisations, such as the

International Accounting Standards Committee (IASC) and the International Auditing Practices Committee (IAPC). These organisations seek to impose on other countries, particularly developing countries, established financial reporting rules conducive to the international mobility of capital. Accountancy firms and professional bodies from the western world (especially, the UK, the USA, Canada, and Australia—for this discussion, being western in approach) primarily dominate these organisations and attempt to set financial reporting standards not just for the western world, but also for the whole world. These rules and regulations are often a response to politics, conflicts and scandals in the western world. But the standards setting agencies, professional bodies and western accounting firms expect them to apply to the entire world economy.”

Dengan pemikiran di atas, bentuk keterlibatan aktif akuntan dalam kancah bisnis dan organisasi global bukan dalam kerangka menyuburkan ketidakadilan, peminggiran dan penindasan terhadap masyarakat lokal maupun bangsa lain melalui berbagai standar dan kebijakan akuntansi. Bukan pula dalam kerangka turut melestarikan atau membiarkan praktik bisnis yang berkontribusi pada perusakan nilai-nilai kemanusiaan, lingkungan dan kemudian menghancurkan alam (lihat diskusinya dalam Chwastiak dan Young (2003). Namun sebaliknya itu dilakukan dalam kerangka mengangkat harkat kemanusiaan yang luhur dan mempromosikan keadilan untuk semua, termasuk keadilan terhadap lingkungan dan

keberlangsungan alam. Hal seperti ini yang didambakan oleh Dwi Setiawan, seorang anggota DPN IAI:

“Peran profesi yang bisa melakukan transformasi dari sekedar “tukang akuntan” menjadi “*leader*” yang dapat memengaruhi perubahan tidak hanya di tatanan *stakeholders* yang sempit, yakni pemegang saham dan manajemen, tapi yang terpenting justru publik/masyarakat dalam arti yang sesungguhnya, melalui informasi “bernilai tambah” yang dihasilkan oleh akuntan.”

Melanjutkan perspektif di atas, akuntan harus menjadi kreator terwujudnya tata kehidupan yang beradab melalui otoritas keilmuan dan keahliannya. Kejujuran, integritas dan kehati-hatian profesional dalam terminologi etika profesi akuntan pada umumnya harus dimaknai kembali sebagai sikap menjaga martabat manusia untuk membangun suatu peradaban agung yang dilandasi oleh prinsip ketuhanan. Dalam konteks ini, berbagai prinsip etika yang dibangun tidak dimaknai dalam semangat menjaga “kepentingan publik” yang menguasai pasar (yang tentu saja orientasinya mencapai laba maksimal dalam suatu bisnis) atau pemegang otoritas publik (yang telah salah kaprah hanya berorientasi pada efisiensi maksimal dalam pengelolaan sektor publik).

Ketiga: Cara Pandang Kebangsaan

Oleh karena cara pandang globalnya, akuntan Indonesia kurang mementingkan pandangan kebangsaannya dalam membangun

standar profesi, termasuk etika profesinya. Dengan ini akan sangat mungkin terjadi suatu situasi, apapun akan dilakukan demi keterterimaan global daripada pengutamaan kepentingan nasional. Disebutkan dalam sambutan Ketua Dewan Standar Profesional Akuntan Publik IAPI⁶, percepatan atas proses pengembangan dan pemutakhiran Standar Profesi yang dilakukan melalui penyerapan Standar Profesi Internasional bertujuan untuk memastikan bahwa Standar Profesi yang digunakan di Indonesia dapat juga diterima dan berlaku di dunia internasional. Jika diresapi, seharusnya pernyataan ini menandakan pengembangan standar profesi dilakukan terlebih dahulu dengan mengeksplorasi nilai-nilai utama bangsa, baru kemudian mengakomodasi nilai-nilai global sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Jika ini dilakukan, secara nilai, akuntan Indonesia didorong untuk lebih mementingkan penyelamatan dan penjagaan aset bangsa dibandingkan yang lainnya.

Dalam cara pandang Pancasila, harus dipahami bahwa aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan harus berakar kuat pada visi kebangsaan yang kokoh oleh karena pluralitas masyarakat Indonesia. Visi kebangsaan yang kokoh ini berupa komitmen untuk membangun kebersamaan menuju tercapainya cita-cita bersama. Membangun kebersamaan ini dilakukan dalam wadah Persatuan Indonesia, yang tidak mengharuskan tercerabutnya akar tradisi dan kesejarahan masing-masing komunitas suku, ras dan agama. Latif (2011; 374) menyampaikan pemikirannya:

⁶ Lihat hal. v Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Edisi April 2009.

“Persatuan Indonesia dalam kerangka *civic-political nationalism* menyaratkan loyalitas warga pada seperangkat cita-cita politik dan kelembagaan yang dianggap adil dan efektif. Untuk itu formasi kebangsaan dalam kerangka menghadapi musuh bersama harus ditransformasikan menjadi usaha merealisasikan keadilan dan kesejahteraan bersama.”

Dalam semangat ini, akuntan Indonesia harus meletakkan peran strategisnya dalam upaya memperkokoh persatuan Indonesia, karena sistem ekonomi dan berbagai praktik bisnis dominan saat ini berpotensi meruntuhkan bangunan persatuan dan kebangsaan ini. Dalam situasi demikian loyalitas akuntan pada bangsanya akan mengalahkan birahi materi yang ditawarkan oleh kaum kolonialis bisnis dan liberalis ekonomi. Dalam kerangka ini pula akuntan dapat berperan dalam penghentian atau setidaknya mengurangi intensitas perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dengan mempromosikan model pelaporan keuangan yang memiliki perhatian terhadap lingkungan dan sosial. Sedangkan bagi akuntan internal, mereka harus menghindari kebijakan akuntansi yang tidak memiliki perhatian terhadap keberadaan lingkungan dan masyarakat, serta kewajiban perusahaan lainnya yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat.

Sementara itu terkait peran akuntan publik, mereka harus menghindari diri sebagai agen kolonialis bisnis yang dilakukan oleh korporasi yang ujung-ujungnya adalah penguasaan atas sumberdaya Indonesia dan peminggiran masyarakat lokal atas peran pengelolaan sumberdaya tersebut. Perlu dipahami bahwa upaya hegemoni ini dapat dilakukan dengan berbagai

instrumen akuntansi yang implementasinya dapat melalui tangan-tangan kuat akuntan publik.

Mengingatkan para akuntan Indonesia tentang situasi yang mungkin tidak disadarinya, menarik untuk memperhatikan pandangan Bakre (2008) berikut ini:

“Within the triangular relationship of colonialism, capitalism and the resultant imperialism, financial reporting has enabled colonial and other transnational businesses to accumulate and allocate economic surpluses and safeguard the interests of colonial and other international capital by “watching over capital” and performing “global functions of capital.”

Visi kebangsaan ini mengarahkan akuntan untuk juga berkomitmen melawan anasir-anasir penghancur kokohnya bangunan kebangsaan Indonesia yang bercokol di bumi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah memperkuat perlawanan terhadap pelaku korupsi dan berbagai tindakan manipulatif yang telah terjadi sedemikian akut di negeri ini. Akuntan harus menyadari bahwa korupsi adalah penyakit mematikan atas kokohnya bangunan kebangsaan Indonesia. Perlawanan terhadapnya harus dilakukan secara simultan dan masif. Ini pula yang diharapkan oleh Prof. Mahfud M.D. (Ketua Mahkamah Konstitusi) dalam menanggapi peran akuntan untuk pemberantasan korupsi⁷:

⁷ Disampaikan dalam Akuntan Indonesia Edisi Khusus Ulang Tahun IAI 23 Desember 2011.

“Saatnya akuntan bertindak. Menunjukkan komitmen bahwa mereka peduli kepada bangsa dan negara. Akuntan dan profesi lain harus bertindak dengan penuh semangat, karena hanya dengan bertindak masalah-masalah kebangsaan akan bisa terselesaikan. Sekarang tinggal melaksanakan dan menjalankan, karena sebenarnya kita memang sudah tahu arah dan rute untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera.”

Keempat: Cara Pandang Kedaulatan dan Musyawarah

Profesi akuntan Indonesia menempatkan keharusan internasional sebagai *driver* pengembangan profesi, termasuk di dalamnya standar perilaku atau kode etik akuntan. Pengembangan berbagai standar profesi, setidaknya sampai saat ini, masih harus terlebih dahulu mengacu pada yang dimiliki oleh “orang lain” atau organisasi profesi internasional (IFAC). Berdasarkan keharusan itu kemudian akuntan Indonesia mengembangkannya berdasarkan yang telah dibuat oleh negara lain atau IFAC ini.

Perlu dipahami kembali bahwa dalam cara pandang Pancasila, prinsip musyawarah mufakat tidak menghendaki situasi di mana suatu keputusan didikte oleh kalangan mayoritas atau kekuatan elit politik dan pengusaha, serta sebaliknya oleh minoritas kuat. Apalagi ini didikte oleh kekuatan dari luar negeri atau kekuatan industri pasar modal global yang dikuasai oleh korporat multinasional yang secara halus bersifat mendominasi atau menghegemoni (lihat Rodrigues dan Craig, 2007). Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan haruslah merupakan aktualisasi dari

nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan cita-cita kebangsaan (Latif, 2011; 45).

Ini memberikan perspektif etis kepada profesi akuntan yang tergabung dalam IAI bahwa kedaulatan organisasi profesi akuntan, sebagai bagian sistem organisasi kemasyarakatan di Indonesia, harus terjaga. Komitmen IAI yang dinyatakan dalam pasal 5 tentang Sifat organisasi, yang berbunyi bahwa IAI adalah organisasi profesi Akuntan di Indonesia yang bebas dan tidak terikat pada perkumpulan apapun, harus dibuktikan. Demikian halnya secara tegas dalam alinea kedua Mukadimah Anggaran Dasar IAI disebutkan, “Bahwa pembinaan dan pengembangan profesi akuntan akan meningkatkan pengabdian profesi akuntan ini dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia.”

Demikian halnya dalam pengembangan standar akuntansi tidak harus selalu menuruti kehendak lembaga-lembaga ekonomi internasional maupun korporasi asing (sebagai pemegang kedaulatan ekonomi dunia), namun yang lebih penting adalah memperhatikan kepentingan masyarakat Indonesia dan khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Suara dan kepentingan mereka ini sulit terwakili dalam komunitas besar dan elit. Oleh karena itu keberpihakan akuntan pada kepentingan korporasi besar yang secara masif menggaungkan adopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) harus diimbangi dengan pengembangan standar ataupun pedoman akuntansi yang cocok dengan karakter usaha di Indonesia, baik usaha besar, menengah dan kecil.

Sementara itu, cara pandang Pancasila untuk aktifitas profesional individu mengarahkan bahwa dalam bekerja (untuk menghasilkan informasi keuangan atau untuk memeriksa kelayakan laporan keuangan) tidak boleh hanya mengikuti kepentingan satu pihak. Dia tidak boleh hanya menuruti kehendak investor/pemegang saham perusahaan yang menjadi kliennya.

Relevan dengan cara pandang Kedaulatan rakyat ini, menarik untuk menyimak pernyataan Dwi Setiawan, salah satu pimpinan DPN-IAI yang juga salah satu pimpinan Pusdiklat BPK-RI):

“Profesi akuntan sebaiknya bisa mempunyai *“positioning”* untuk lebih memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Peran akuntan yang menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan di lintas sektor, baik bisnis dan sektor publik, korporasi sampai ke UKM dan koperasi, bahkan organisasi pemerintah dan non-profit sampai ke rumah tangga. Informasi itu semestinya diungkapkan yang seimbang dengan *disclosure* yang bisa memberikan makna tidak sekedar aspek finansial tapi juga aspek non-finansial, sumberdaya *tangible* maupun *intangible*, akuntabilitas publik, sosial, lingkungan bahkan yang paling mendasar yakni akuntabilitas spiritual.”

Untuk beberapa hal, prinsip-prinsip etika dalam kode etik IAI telah mengakomodasi cara pandang ini. Setidaknya ini tampak pada prinsip pertama tentang Tanggung Jawab Profesi, prinsip kedua tentang Kepentingan Publik, dan kemudian prinsip ketiga tentang Integritas. Sementara itu suasana yang

sama seperti di atas belum tampak jelas dinyatakan dalam kode etik IAPI.

Kelima: Cara Pandang Keadilan Sosial

Alinea pertama Mukadimah Anggaran Dasar IAI menyebutkan bahwa “Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka adalah kewajiban bagi setiap warga Negara Indonesia untuk berdharma bakti sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing dalam pembangunan nasional tersebut.” Ini merupakan pernyataan strategis untuk pemosisian peran akuntan Indonesia dalam konteks kebangsaan. Meskipun demikian, substansi pernyataan dalam mukadimah ini belum ditarik secara tegas sebagai referensi etis profesi yang termaktub dalam kode etik akuntan Indonesia.

Visi keadilan sosial diwujudkan dalam penyeimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, serta keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara). Dalam cara pandang Pancasila, perwujudan keadilan sosial ini sekaligus merupakan aktualisasi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Merujuk pembahasan Latif (2011; 46), dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi diberi peran yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan, bukan semangat individual. Tentu saja ini berseberangan dengan semangat kapitalisme dan liberalisme yang mana individualisme sebagai

dasarnya. Soekarno secara tegas mengatakan, “Dengan menyetujui kata keadilan sosial dalam *preamble*, berarti merupakan protes kita yang mahahebat kepada dasar individualisme” (Latif, 2011; 187). Mengapa Soekarno bersikap sangat keras terhadap kapitalisme, liberalisme dan individualisme? Suseno (2003; 165) mengemukakan ciri kapitalisme:

”Hukum keras kapitalisme adalah persaingan. Demi persaingan, produktivitas produksi harus ditingkatkan terus menerus. Artinya, biaya produksi perlu ditekan serendah mungkin sehingga hasilnya dapat dijual semurah mungkin dan dengan demikian menang terhadap hasil produksi saingan. Dengan demikian lama kelamaan semua bentuk usaha yang diarahkan secara tidak murni ke keuntungan akan kalah.... Lama kelamaan semua bidang produksi maupun pelayanan dijalankan secara kapitalistik. Apa yang semula dijalankan secara iseng-iseng dan sampingan, misalnya membuka biro perjalanan, akan dijalankan dengan semakin efisien dan hal itu hanya mungkin dilakukan oleh usaha besar. Maka usaha kecil akan dimakan oleh yang besar.”

Bagaimana keadilan dalam kerangka Pancasila dimaknai? Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan FE Universitas Brawijaya (2009) menyampaikan suatu pandangan bahwa:

1. Keadilan dalam hubungan ekonomi antar manusia secara orang seorang dengan senantiasa memberikan kepada sesamanya apa yang semestinya diterima sebagai haknya. Inilah yang melahirkan keadilan tukar menukar.

2. Keadilan dalam hubungan ekonomi antara manusia dengan masyarakatnya, dengan senantiasa memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Inilah yang melahirkan keadilan sosial.
3. Keadilan dalam hubungan ekonomi antara masyarakat dengan warganya, dengan senantiasa membagi segala kenikmatan dan beban secara merata sesuai dengan sifat dan kapasitasnya masing-masing. Inilah yang melahirkan “keadilan distributif”.

Yang menarik dari pandangan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Brawijaya ini, menurut Latif (2011; 586), adalah bahwa perwujudan keadilan tersebut tidak seharusnya hanya didasarkan pada asas legal formal saja, tetapi harus juga dibarengi oleh rasa kasih sayang, yang mana sendi ini disebut sebagai “kepentasan” yang mengandung semangat kemanusiaan.

Berangkat dari pemahaman yang demikian maka akuntan Indonesia harus mempunyai perhatian yang besar untuk menyeimbangkan pemenuhan kesejahteraan diri dan masyarakatnya. Akuntan harus terlibat pada perwujudan keadilan sosial melalui pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Dengan demikian dalam menjalankan tugas profesionalnya, akuntan tidak boleh hanya mendasarkan pada dipenuhinya hak pribadi dirinya, tetapi lebih mulia dari itu adalah pemenuhan kewajiban kepada masyarakatnya. Dalam konteks yang demikian, akuntan Indonesia harus merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk turut memberdayakan berbagai usaha rakyat dalam berbagai skala yang ada. Dalam ranah kebijakan

profesi, standar/pedoman akuntansi dan auditing juga harus disusun dalam kerangka penguatan usaha-usaha tersebut berdasarkan nilai-nilai dasar yang menyertainya. Penguatan ini tentunya tidak lantas mengarahkan para pelaku usaha rakyat untuk menjadi kapitalis baru yang ujung upayanya adalah pemusatan dan pemupukan kekayaan pada dirinya. Penguatan ini diarahkan agar berbagai pelaku usaha tetap mengusung spirit membangun tata kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera bersama.

Dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang dilandasi oleh rasa kasih sayang, akuntan tidak layak bertindak eksploitatif terhadap institusi, partner kerja dan masyarakatnya meskipun baginya memungkinkan untuk melakukannya karena memiliki keahlian dan ketrampilan khusus. “Kepantasan” menjadi pertimbangan subyektif akuntan untuk memperlakukan pihak lain secara adil dan kemudian mencapai kesejahteraan yang diharapkan bersama. Ini mendorong dimilikinya sifat akuntan yang memberdayakan pihak yang bekerjasama dengannya, bukan sebagaimana dalam karakter kapitalistik yang harus mengalahkan dan melemahkan.

Dalam cara pandang ini pula akuntan harus turut mempromosikan suatu sistem ekonomi dan praktik bisnis yang berazaskan kekeluargaan, bukan yang berazaskan individualisme. Mengikuti alur pemikiran demikian maka konsep dan standar akuntansi yang dikembangkan oleh akuntan Indonesia harus mencerminkan semangat kekeluargaan ini. Sekaligus semangat ini dapat dibawa sebagai referensi etis akuntan Indonesia.

Cara pandang keadilan sosial di kalangan akuntan semestinya dikembangkan sebagaimana tercermin dari harapan

yang disampaikan oleh Hasan Fauzi, PhD (akademisi akuntansi Universitas Negeri Sebelas Maret) berikut ini:

“Memang *kalo* ditarik pemikiran yang mendalam, profesi kita ini menjadi instrumen yang cukup penting di dalam memberikan kontribusi bagi penegakan keadilan bangsa ini dari aspek akuntabilitas. Nah *kalo* semua yang terlibat dalam profesi ini dibangun dengan etika berbasis Ketuhanan dan kepemimpinan nasional kita juga bisa memberikan contoh ke arah itu, maka tidak mustahil negara ini akan menjelma menjadi negara yang *Baldatun*, yaitu negara makmur penuh barokah dari Allah SWT.”

IV. Spirit Ketuhanan untuk Membangun Komitmen Etis

Bapak Rektor, Anggota Senat dan hadirin yang mulia.

Sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa insan-insan Indonesia haruslah berkeyakinan atas adanya Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan ini harus dihadirkan dalam setiap relung jiwa seluruh Bangsa Indonesia sebagai sumber nilai dan sumber motivasi dalam merealisasikan misi kemanusiaannya, mengikat komitmen kebangsaannya, membangun kekuatan kepemimpinan kolektifnya, serta akhirnya mengukir prestasi untuk mencapai kesejahteraan. Tuhan adalah yang Pertama dan Yang Utama bagi setiap pribadi Bangsa Indonesia, sementara ketuhanan adalah sifat yang melekat dalam diri insan Indonesia untuk merealisasikan visi kehidupannya. Inilah yang membedakannya dengan bangsa lain (khususnya Bangsa Barat), yang visi kehidupannya hanya dibatasi pada dimensi kepentingan diri yang sarat pertimbangan materi (untung rugi). Suasana batin yang demikian terefleksi sejak masa perjuangan

Bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan dan juga dalam semangat membangun nasionalisme Indonesia. Dalam *Suluh Indonesia* (12 Agustus 1928), sebagaimana dikutip oleh Latif (2011; 68), Soekarno menulis:

”Nasionalisme kita ialah nasionalisme ketimuran dan sekali-kali bukanlah nasionalisme kebaratan yang menurut perkataan C.R. Das adalah suatu nasionalisme yang menyerang-nyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluannya sendiri. Suatu nasionalisme perdagangan untung atau rugi. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi ”perkaknya Tuhan” dan membuat kita hidup dalam roh.”

Agus Salim menulis di *Fajar Asia* no. 170 tahun 1928, sebagaimana dikutip oleh Latif (2011; 67-68), bahwa:

”Atas nama tanah airnya masing-masing, kita lihat bangsa-bangsa Eropa merendahkan derajat segala bangsa luar Eropa, bagi meninggikan derajat bangsa-bangsa Eropa atas segala bangsa di luar Eropa... Atas dasar perhubungan yang karena benda dunia dan rupa dunia tidaklah akan dapat ditumbuhkan sifat-sifat keutamaan yang perlu untuk mencapai kesempurnaan. Atas dasar keduniaan yang bersifat benda dan ikhlas dan tawakal, yang sampai menyabilkan nyawa. Sebab benda dan rupa dunia habis gunanya, apabila nyawa sudah tiada. Maka sebagai bagian dalam tiap-tiap hal yang mengenai dunia kita, demikian cinta tanah air, kita mesti menunjukkan cita-cita yang lebih tinggi daripada segala benda dan rupa

dunia, yaitu kepada hak, keadilan dan keutamaan yang batasnya dan ukurannya telah ditentukan oleh Allah SWT.”

Berkaca dari spirit perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka dan membangun nasionalisme Indonesia, selayaknyalah akuntan Indonesia menyadari hakekat dirinya sebagai insan bangsa yang berkewajiban memelihara cita-cita perjuangan tersebut. Menjaga kelangsungan kemerdekaan dan nasionalisme Indonesia dalam spirit ketuhanan seharusnya tetap menjadi kata kunci di manapun akuntan berkiprah. Jati diri akuntan Indonesia sebagai bagian Bangsa Indonesia yang meletakkan Tuhan sebagai sumber nilai dan sumber motivasi secara alamiah seharusnya tetap melekat pada diri akuntan dan organisasi profesi akuntansi Indonesia. Lalu, sebegitu pentingnyakah memelihara dan mempromosikan spirit ketuhanan bagi akuntan?

Dalam suatu kesempatan menjawab secara spontan dan tertulis sebuah pertanyaan terbuka tentang bagaimana etika profesi akuntan di Indonesia⁸, beberapa mahasiswa S3 Akuntansi Universitas Brawijaya menyatakannya dengan mengaitkan etika akuntan pada kata-kata Tuhan/Ketuhanan. Di antara mereka antara lain menuliskan sebagai berikut:

- Etika akuntan diturunkan dari nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Indonesia yang berketuhanan YME (M. Nurbirton).
- Akuntan seyogyanya memiliki etika profesi yang berisi komitmen tinggi pada diri sendiri agar dapat

⁸ Pertanyaan disampaikan sebagai pertanyaan refleksif di akhir sesi kuliah mata kuliah Riset Akuntansi Interpretif pada tanggal 09 Maret 2012.

mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya kepada Tuhan (Dewi Utari).

- Etika profesi akuntan juga harus menekankan/memuat hal-hal yang lebih luas terkait kejujuran, pertanggungjawaban sosial dan juga pertanggungjawaban kepada Tuhan (Herlin Tundjung).
- Etika terbaik adalah ketika ia bersaksi dan memberikan opini, ia harus mampu bersaksi di hadapan Tuhan (Hanif).

Tentunya pernyataan-pernyataan tersebut secara spontan muncul karena idealisasi mereka terhadap profesi akuntansi agar lebih terhormat di masyarakat, serta daya kritis mereka sebagai dosen dan keterlibatannya dalam berbagai bentuk praktik profesi. Hal demikian juga muncul karena pengalaman batin mereka sebagai warga Indonesia yang dalam kesehariannya tidak lepas dari kerangka keberagaman yang dianutnya, sehingga motivasi terkuat dalam hidup bagi dirinya adalah Tuhan.

Ini sekaligus menandakan bahwa spirit ketuhanan dalam suatu negara yang mengakui keberadaan agama seharusnya dibangun dalam koridor agama. Bagaimanapun agama adalah sumber nilai yang sangat kaya dan dengan demikian dapat disemaikan dalam konteks penguatan etika profesi. Agama secara mendasar telah memberikan petunjuk bagaimana seseorang harus bersikap dan berperilaku. Bahkan senyatanya agama tidak hanya meliputi suatu sistem formal peribadatan tetapi juga petunjuk untuk hubungan sosial (Shaw and Barry, 2007; 10).

Realitas praktik kehidupan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar kehidupan di mana praktik-praktik tersebut

berlangsung. Demikian halnya praktik profesi seharusnya tumbuh berdasar interaksinya dengan nilai-nilai dan aspek-aspek lingkungan yang melingkupinya. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi agama dan spiritualitas, pengembangan konsep dan praktek kehidupan sangatlah penting mendasarkan padanya. Dalam konteks keindonesiaan, pengembangan etika profesi seharusnya juga terwarnai nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Walaupun Indonesia bukan merupakan negara agama, tetapi beragama adalah suatu kewajiban dan kebutuhan asasi.

Terlebih dalam lingkungan kerja di Indonesia yang masyarakatnya tidak dapat lepas dari dimensi keberagamaannya, maka nilai-nilai keagamaan yang melahirkan spirit ketuhanan harus tambah diperkuat. Hal yang disampaikan Cavanagh (1999) berikut ini tentunya dapat dijadikan pelajaran bagi profesi akuntan dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya:

“Spiritualitas di tempat kerja membantu banyak hal. Bagaimanapun, kecenderungan saat ini adalah ketidakpastian. Di antara para pendukung pengembangan spiritualitas di tempat kerja, mereka menyatakan “Modern berfokus pada obyektifitas dan pemisahan sains dan spiritualitas, memisahkan orang-orang dari yang lain, memisahkan dari alam dan memisahkan dari Tuhan.”

Demikian halnya Holenstein (2005), yang mana ini sangat relevan dengan konteks keindonesiaan, mengemukakan

bahwa agama dan spiritualitas adalah kekuatan sosio-kultural untuk motivasi, keinklusan, partisipasi dan keberlangsungan. Demikian juga secara lebih mendalam dikemukakan oleh Clark (2004) bahwa:

“Agama dan spiritualitas adalah kenyataan hidup yang dihubungkan dengan tujuan akhir dan makna dalam kehidupan. Ia juga merupakan seperangkat prinsip dan etika untuk hidup, komitmen kepada Tuhan atau kehidupan yang lebih tinggi, pengakuan yang transenden dalam menjalani keseharian hidup, serta tidak berfokus pada diri. Ia juga meliputi seperangkat keyakinan dan praktik yang didesain untuk memfasilitasi suatu hubungan yang transenden.”

Upaya menggunakan ajaran agama sebagai basis pengembangan perilaku profesional bukanlah sesuatu yang utopis. Roth (2005; 58-68) menjelaskan tentang peranan tiga agama (Yahudi, Kristiani dan Islam) dalam membangun etika di tempat kerja. Liyanarachchi (2008) mengeksplorasi nilai-nilai Budha untuk mengembangkan etika dalam akuntansi. Oh *et al.* (2004) mempromosikan prinsip-prinsip Islam dan Budha untuk memecahkan dilemma moral dalam akuntansi.

Ludigdo (2010a) melakukan penggalan nilai-nilai spiritualitas Islam untuk membangun kepemimpinan etis dalam bisnis. Upaya ini kemudian dilanjutkan oleh Ludigdo (2010b) dalam membangun gagasan kepemimpinan etis di kantor akuntan publik. Pada konteks ini, Islam, sebagaimana agama yang lain, dapat menghadirkan kerangka nilai untuk mengembangkan perilaku etis dalam suatu hubungan sosial.

Bahkan ini juga diakui oleh Roth (2005; 60) yang menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan dengan sangat rinci cara orang-orang harus menjalani kehidupannya, termasuk jika mereka ingin diberkahi (dalam menjalankan pekerjaannya). Selain itu Agustian (2001; 177-284) menguraikan spirit untuk menghadirkan suatu mode kehidupan dan kepemimpinan etis berdasar Rukun Iman dan Rukun Islam.

Memperhatikan pemaparan di atas, merupakan suatu keniscayaan untuk memperkuat pembangunan komitmen etis akuntan Indonesia berdasarkan spirit ketuhanan. Kehadiran Tuhan dan sifat-sifat ketuhanan diperlukan sehingga dapat merekonstruksi sikap dan perilaku etis akuntan Indonesia yang selama ini cenderung mengikuti cara pandang Barat yang kapitalistis dan cenderung mengejar sesuatu yang bersifat materi belaka. Suatu cara pandang yang menempatkan kemewahan atau kepemilikan harta yang berlimpah sebagai puncak kebahagiaan. Berbicara dalam konteks yang demikian, Knight dan O'leary (2005) menekankan bahwa beberapa, untuk tidak menyebut semua, problem etis dalam kapitalisme korporat berpusat pada kegagalan kepemimpinan dalam bisnis korporat tersebut. Kegagalan seperti ini dikarenakan para pemimpin bisnis selalu dan hanya berorientasi pada pencapaian yang bersifat materi (keuntungan/kekayaan) dan duniawi (kemewahan/prestise). Mereka mengabaikan yang bersifat di luar materi (keseimbangan hidup/ketenangan batin/kebahagiaan bersama) dan ukhrowi (keselamatan dan kenikmatan hidup sesudah mati).

Mengacu pada pandangan Zohar dan Marshall (2007; 29), dalam perspektif bisnis orang Amerika, nilai-nilai yang dalam mengacu pada hal-hal yang terkait dengan keunggulan,

memenuhi potensi seseorang dan membiarkan orang lain melakukan hal yang sama, prestasi, kualitas produk dan jasa, serta komitmen pada pertumbuhan tanpa akhir. Perspektif seperti ini oleh Capra (2000; 324) disebut sebagai obsesi terhadap pertumbuhan ekonomi. Obsesi yang demikian ini telah menciptakan suatu lingkungan fisik dan mental yang sangat tidak sehat bagi kehidupan.

Keniscayaan untuk menghadirkan spirit ketuhanan dalam profesi akuntan juga didasarkan pada argumentasi tentang karakter asasi manusia, dalam mana telah terjadi perjanjian tradisional dan substansial antara manusia dengan Tuhannya. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Al A'raaf; 172:

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari Bani Adam keturunannya dari sulbinya, dan menyuruh mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri (atas pertanyaan), "Bukankah Aku Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, "Ya, kami bersaksi" "

Perjanjian ini, yang merupakan bekal awal dan sangat asasi, serta tertanam dalam diri manusia yang kemudian disebut sebagai *God-Spot*⁹. Bekal asasi inilah yang kemudian mengarahkan kecenderungan manusia untuk selalu menuju kebenaran (*hanief*) dalam hidupnya. Bagaimana ini dapat terjadi tentunya melalui sebuah proses, yang dalam ajaran Islam ini dilalui antara lain dengan jalan syari'ah maupun

⁹ Letak *god-spot* ini pada bagian samping kepala yang disebut *Lobus Temporal* (lihat Pasiak, 2002; 69).

tasawuf yang sama-sama telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Penguatan etika akuntan berbasis spirit ketuhanan dapat dilakukan melalui pemahaman dan pengembangan potensi lain manusia di luar kecerdasan rasional (IQ) dan kecerdasan emosinya (EQ), yaitu kecerdasan spiritual (SQ). SQ adalah kecerdasan yang berkaitan dengan hal-hal transenden, serta hal yang mengatasi waktu. Kecerdasan ini melampaui kekinian dan pengalaman manusia, dan merupakan bagian terdalam serta terpenting dari manusia (Pasiak, 2003; 137). Ataupun sebagaimana dikatakan Agustian (2001; 57), SQ adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang fitrah, menuju manusia yang seutuhnya (*hanief*), dan memiliki pola pemikiran tauhidi (integralistik), serta berprinsip "hanya karena Allah". Sementara Zohar & Marshall (2007; 3-4) mengemukakan bahwa SQ merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain.

Dengan demikian ketika spirit ketuhanan digunakan untuk membangun preferensi etis akuntan atau lebih formal diadopsi dalam etika profesi dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan profesi (bukan sekedar retorika), maka profesi akuntan dapat berkontribusi besar untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih beradab.

V. Merealisasikan Etika Profesi Berparadigma Pancasila

Bapak/Ibu/Saudara hadirin yang dirahmati Allah SWT.

Ada sejumlah tantangan untuk merealisasikan berkembangnya etika akuntan berparadigma Pancasila. Hal ini harus menjadi perhatian profesi akuntan, khususnya para penggiat profesi akuntan di Indonesia. Tentunya dalam kerangka ini yang sangat strategis berperan adalah kalangan akuntan pendidik/akademisi. Ini terutama terkait dengan peran pendidikan akuntansi dalam mengelaborasi nilai-nilai Pancasila dalam ranah akademik dan mengembangkannya lebih lanjut melalui riset-riset akademik untuk kemudian disebarakan pada ranah praktik akuntansi.

Pertama. Profesi akuntan harus menyadari bahwa pendidikan akuntansi seharusnya dikembangkan sebagai bagian dari proses pendidikan nasional yang mempromosikan penguatan karakter bangsa, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1). Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Berlandaskan ini diharapkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua. Pendidikan akuntansi seharusnya memberi ruang yang memadai untuk menempatkan Pancasila sebagai filosofi dasar pengembangan pendidikan akuntansi dan sekaligus sebagai dasar dalam pengembangan karakter akuntan

Indonesia. Untuk ini berbagai kajian akademik, khususnya yang menyangkut materi pembelajaran mata kuliah yang harus bermuatan nilai-nilai dan norma berperilaku, perlu secara intensif dilakukan.

Ketiga. Akuntan pendidik/akademisi seharusnya mengembangkan sikap kritis dalam mengadopsi pemikiran bisnis dan akuntansi, khususnya yang tertuang dalam berbagai literatur bisnis dan akuntansi. Ilmu pengetahuan yang tertulis dalam berbagai literatur dibangun dan dikembangkan dari latar belakang ideologi dan budaya yang berbeda. Menyadari hal ini akuntan pendidik bertugas bukan hanya mentransfernya kepada mahasiswa, namun selalu memberikan catatan khusus atasnya sekiranya hal itu tidak selaras dengan kepribadian bangsa. Mempelajarinya untuk merekonstruksi, mereproduksi dan bahkan menghasilkan ilmu pengetahuan di bidang bisnis dan akuntansi haruslah menjadi bagian dari strategi pengembangan pendidikan akuntansi. Hal demikian selaras dengan *uneg-uneg* Prof. Soewarjono (Akademisi Akuntansi FEB UGM) yang disampaikan dalam suatu dialog informal dengan penulis, bahwa seharusnya akademisi akuntansi berbuat untuk mengembangkan akuntansi yang akan dipraktikkan melalui media akademiknya, bukan hanya mengikuti pola yang dilakukan oleh para praktisi akuntansi. Menurutnya, produk akuntansi seharusnya lahir dari akademisi akuntansi. Jika ini dilakukan maka akhirnya akademisi akuntansi akan menjadi “Sang Pencerah” bagi calon-calon akuntan, serta menjadi “Sang Penemu” akuntansi yang lebih berkarakter Indonesia.

Keempat. Bersama-sama dengan komponen bangsa yang lain, profesi akuntan harus aktif melakukan revitalisasi keberadaan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

Sebagai falsafah, ia merupakan suatu cara pandang dalam menjalani hidup di berbagai sektor kehidupan, termasuk kehidupan profesional. Upaya peminggiran Pancasila yang masif terjadi harus dihadapi dengan cara-cara yang bijak dan konstruktif, namun tegas dan cerdas.

Kelima. Profesi akuntan harus meyakinkan diri bahwa situasi ekonomi dan politik yang terjadi saat ini bukanlah cerminan dari karakter dan budaya bangsa yang berkembang berdasarkan Pancasila. Ini adalah akibat dari ketidakkukuhan semua komponen bangsa untuk mengembangkan pemikiran dan cara hidup berdasar Pancasila. Yang terjadi saat ini sesungguhnya adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasar keyakinan ini akuntan tidak boleh terbawa arus pendiskreditan Pancasila dengan membenturkannya pada realitas masyarakat Indonesia saat ini.

Keenam. Organisasi profesi akuntan Indonesia (IAI, IAPI dan lain-lain) seharusnya berani melakukan rekonstruksi kode etik profesi yang dimuati dengan nilai-nilai Pancasila. Pemaknaan etika akuntan dengan nilai-nilai Pancasila justru secara substansif akan memperkuat isi kode etik sebagai kerangka nilai profesi akuntan yang luhur dan mendukung pencapaian maksud dan tujuan IAI yang termaktub dalam Anggaran Dasarnya. Upaya ini tentunya juga dilakukan dengan tidak mengabaikan aspek-aspek penting dalam kode etik IFAC, selama pemaknaan di dalamnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ketujuh. Dalam kerangka infusi spirit ketuhanan dan kesetiaan kepada Pancasila, profesi akuntan perlu mempertimbangkan untuk mengharuskan adanya sumpah profesi kepada para akuntan. Sumpah profesi selama ini belum

dilakukan oleh profesi akuntan. Meskipun selama ini dikesankan hanya bersifat formalitas, sejatinya sumpah merupakan komitmen pribadi seseorang untuk menjalankan sesuatu berdasarkan keyakinan agama dan komitmen pribadi pengangkat sumpah kepada Tuhannya. Spirit ketuhanan ini akan terwujud pada sikap ihsan dalam menjalani aktifitas profesionalnya. Ihsan adalah suatu kesadaran yang meyakini bahwa Tuhan selalu mengetahui apa yang dilakukannya. Dengan sumpah ini diharapkan akuntan selalu berihsan¹⁰, yaitu menjaga dirinya dari sikap dan perilaku yang dilarang oleh Tuhan dan karenanya moralitasnya selalu terjaga. Ini layak dilakukan profesi akuntan, khususnya ketika mereka baru lulus pendidikan profesi. Bagaimanapun sumpah telah menjadi prosesi yang wajib dilakukan oleh profesi lain, misalnya profesi dokter dan profesi notaris.

VI. Penutup

Bapak Rektor/Anggota Senat dan hadirin yang mulia.

Sebagai penutup perlu disampaikan bahwa membawa Pancasila dalam ranah etika profesi akuntan Indonesia bukanlah suatu kemustahilan. Profesi akuntan Indonesia adalah bagian dari Bangsa Indonesia yang harus membangun jati dirinya berdasarkan nilai-nilai keindonesiaan. Secara realitas, “kedua kaki” akuntan Indonesia berpijak di bumi Indonesia dan “makanannya” adalah nutrisi yang tumbuh dari tanah air Indonesia.

¹⁰ Dalam Konvensi Nasional Akuntan (KNA) IAI tahun 2009 di Bandung, telah direkomendasikan bahwa ihsan seharusnya menjadi karakter utama akuntan Indonesia.

Globalisasi adalah keniscayaan, namun nilai-nilai keindonesiaan harus menjadi landasan untuk memasukinya. Dalam situasi apapun cara pandang Pancasila harus digunakan untuk membangun kepribadian akuntan Indonesia dan kemudian berperan dalam skala global membangun peradaban. Nilai-nilai ketuhanan melandasi perealisasi nilai-nilai kemanusiaan, visi kebangsaan, dan kedaulatan rakyat yang akhirnya dimaksudkan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang adil dan sejahtera lahir batin. Membunyah suatu harapan bahwa dengan berbasis Pancasila, karakter etis akuntan Indonesia akan terbentuk dengan lebih baik dengan pengutamaan kepentingan mencapai kesejahteraan Indonesia dan penjagaan terhadap keberlangsungan Indonesia.

Dwi Setiawan, aktifis muda IAI yang anggota DPN IAI, berpandangan bahwa merupakan gagasan menarik untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam etika profesi akuntan, seperti nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, harmonisasi dalam keragaman, demokrasi dan keadilan sosial. Demikian pula Prof. Adji Suratman, salah satu senior di IAI, mengungkapkan dukungannya agar nilai-nilai Pancasila terimplementasikan dalam hidup dan kehidupan akuntan dengan tujuan agar para akuntan menjadi lebih amanah dan tidak ada lagi kasus-kasus *mark up, window dressing*, rekayasa untuk jangka pendek yang akhirnya menimbulkan terjadi krisis keuangan seperti Enron, Worldcom dan sebagainya.

Sementara itu, dalam kerangka cara pandang Pancasila, spirit ketuhanan perlu dipertegas keberadaannya karena dapat menjadi sandaran moral yang hakiki bagi keberlangsungan profesi akuntan Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Pengakuan adanya Tuhan membawa

konsekuensi keharusan akuntan untuk tunduk pada hal yang dilarang oleh-Nya dan mempromosikan kebaikan yang diharuskan-Nya. Akuntan sebagai profesional harus memaknai segala tindakan profesinya semata-mata hanya karena Allah untuk kemaslahatan semesta. Mengacu pada argumentasi demikian maka tidak berlebihan ketika Bambang Setiawan memberikan tanggapan atas pandangan Drs. Zaenal Soedjais dalam suatu milis yang telah dikutip pada bagian lain naskah pidato ini:

“Saya sependapat dengan beliau, dan marilah kita coba membumikan 'mimpi' tadi dalam kode etik akuntan Indonesia dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang universal dan memperkuatnya dengan azas-azas kebangsaan kita Pancasila, akan menjadi berkah bagi akuntan Indonesia jika kode etik pertama akuntan Indonesia adalah: Akuntan Indonesia menjalankan profesinya berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Vivat akuntan Indonesia.”

Bagaimanapun etika adalah sesuatu yang seharusnya terbangun dan dibangun. Etika akuntan terbangun dari situasi budaya yang lekat dengan nilai-nilai yang diyakini suatu masyarakat di mana akuntan berada, dan dibangun melalui suatu proses alamiah dan akademik. Suatu proses yang berlangsung dalam suasana alam dan budaya Indonesia, serta dilakukan melalui proses akademik di pusat-pusat pemikiran akademisi Indonesia. Proses seperti inilah yang kemudian membentuk kepribadian akuntan Indonesia, yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa yang terkristal dalam Pancasila.

Ucapan Terima Kasih

Bapak/Ibu/Sdr. yang mulia.

Di akhir pidato ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan besar dalam pencapaian saya menjadi guru besar ini. Sebuah anugerah luar biasa untuk diri saya, yang rasanya teramat berat akan dapat saya capai, terutama ketika saya mengingat awal karir saya sebagai seorang dosen.

Pertama, tentu saja puji syukur selalu saya haturkan kepada Allah SWT. Hanya atas kehendak-Nya saya mencapai derajat tertinggi di dunia akademik dari almamater yang saya cintai ini. Alhamdulillah ya Allah, anak seorang guru SD dan pedagang pasar tradisional di pegunungan Trenggalek dapat menjadi guru besar.

Kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berdasarkan kewenangannya memperkenankan saya menyandang predikat guru besar di bidang etika bisnis dan profesi ini. Semoga Allah SWT selalu menuntun saya menjalani amanah ini.

Kepada Senat Universitas Brawijaya dan Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, saya mengucapkan terima kasih atas persetujuan dan rekomendasinya untuk pengajuan kenaikan jabatan akademik sebagai guru besar ini.

Terima kasih saya sampaikan kepada jajaran pimpinan Universitas Brawijaya. Kepada Bapak Rektor, terima kasih atas dorongan dan responnya untuk menyegerakan segala proses pengajuan guru besar saya. Demikian halnya kepada para Pembantu Rektor yang telah menyaranai kepentingan saya untuk menjadi guru besar ini.

Kepada para pelopor, pendiri dan penggerak Universitas Brawijaya, terima kasih dan penghargaan yang tulus atas pengorbanannya yang luar biasa. Terima kasih juga kepada para Rektor periode-periode sebelumnya yang telah menata sistem dan sarana di Universitas Brawijaya sehingga memungkinkan saya sekarang ini menjadi seorang guru besar.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya ucapkan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB-UB). Beliau berusaha keras untuk membuat FEB-UB menjadi institusi terbaik di tingkat nasional dan internasional. Iklim pelayanan prima dibangun dengan baik, termasuk menyegerakan semua proses pengajuan guru besar di FEB-UB. Dengan tetap memperhatikan kehati-hatian dalam prosesnya, alhamdulillah upaya penyegeraan ini berhasil. Demikian halnya terima kasih saya sampaikan kepada Para Pembantu Dekan, Kolega saya Para Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Para Ketua Program Studi di lingkungan FEB-UB. Tim kerja yang hebat dan saling dorong untuk menghasilkan prestasi kerja terbaik.

Terima kasih kepada para Dekan dan Pimpinan FEB-UB pada periode-periode terdahulu, di mana mereka sebagai pemimpin hebat di masanya telah menciptakan peluang beraktifitas yang luas kepada semua orang di lingkungan FEB-UB. Harus saya akui, mereka berkontribusi besar buat karir saya sehingga menjadi guru besar.

Terima kasih saya sampaikan kepada Prof. M. Nasir, PhD, Ak (Guru Besar Akuntansi, Dekan FEB Universitas Diponegoro dan Ketua IAI Kompartemen Akuntan Pendidik), Prof. Tjiptohadi Sawardjuwono, PhD, Ak (Guru Besar Akuntansi FEB Universitas Airlangga) dan Prof. Dr. I Wayan

Ramantha (Guru Besar Akuntansi FE Universitas Udayana) yang telah berkenan menelaah karya tulis dan publikasi saya sehingga dianggap layak untuk diajukan sebagai persyaratan pengajuan guru besar.

Terima kasih kepada guru-guru saya yang luarbiasa hebatnya sejak saya belajar di taman kanak-kanak sampai pendidikan doktoral di perguruan tinggi, tanpa terkecuali. Secara khusus terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Drs. Abu Mansyur dan Bapak Drs. Ar Rofiq Anwar yang semasa SMA banyak membantu untuk tumbuh sebagai manusia dewasa dan juga menginspirasi saya untuk meraih prestasi terbaik sehingga saat itu dapat menjadi Pelajar Teladan se-Kabupaten Trenggalek dan finalis cepat tepat TVRI Surabaya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rosidi, Ak yang menjadi dosen wali saya ketika menempuh studi S1 Akuntansi. Terima kasih kepada Prof. Dr. Bambang Subroto, Ak sebagai Pembimbing skripsi yang sangat percaya kepada kemampuan saya untuk menyelesaikan keseluruhan draf skripsi hanya dalam waktu satu bulan. Terima kasih kepada almarhum Prof. Dr. Mas'ud Machfoedz, Ak (*allahummafirllahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu*) sebagai Pembimbing tesis yang sekaligus memberi banyak inspirasi kepada saya dalam menjalani kehidupan sebagai dosen. Jalan saya begitu terbuka untuk menekuni bidang Etika Bisnis dan Profesi berangkat dari dorongan dan kesediaan beliau membimbing tesis saya. Terima kasih kepada Prof. Umar Nimran, PhD, Prof. Iwan Triyuwono, PhD, Ak dan Prof. Eko Ganis S., PhD., CSRS. yang berkenan membimbing saya dalam penyusunan disertasi. Keterbukaan pandangan dan inspirasi yang luar biasa dari beliau-beliau ini yang akhirnya mengantarkan saya menjadi guru besar di

bidang Etika Bisnis dan Profesi. Tidak lupa terima kasih saya sampaikan kepada almarhum Bapak Drs. Soedamar H.W. (*allahummafirllahu warhamhu wa'afih wa'fu 'anhu*), yang saat menjabat PD III FE-UB menyakinkan saya bahwa pilihan menjadi dosen itu bukanlah pilihan yang salah dan oleh karenanya beliau sempat “memarahi” saya ketika saya sampaikan niat saya untuk mengundurkan diri sebagai dosen.

Terima kasih kepada semua kolega saya di Jurusan Akuntansi dan FEB-UB, tanpa terkecuali. Selama 18 tahun saya berkarir sebagai dosen, saya telah belajar banyak kepada mereka. Secara khusus terima kasih kepada Gugus Irianto, Ph.D., Ak, yang sejak awal saya masuk sebagai dosen berkenan menjadikan saya sebagai partner kerjanya. Ini sangat berarti bagi saya, terlebih ketika saya mengalami tekanan lingkungan yang keras di awal saya bekerja. Demikian pula terima kasih kepada Dr. M. Achsin, Ak. yang *ngaruh-ngaruhi* saya untuk bertahan sebagai dosen di UB. Terima kasih kepada Dr. Zaki Baridwan, Ak yang “menjerumuskan” saya untuk berkarir sebagai dosen di UB. Terima kasih kepada Prof. Iwan Triyuwono, PhD, Ak yang banyak mengajak saya menjelajahi dunia ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan tidak terbatas ini dengan pikiran dan hati terbuka. Terima kasih kepada semua senior dosen dan pendahulu saya sebagai Ketua Jurusan Akuntansi FEB-UB, serta sdr. Abdul Ghofar, M.Si., M.Acc., Ak dan sdr. Helmy Adam, MSA, Ak., CPMA. yang berkenan mendampingi saya sebagai Sekretaris Jurusan dalam dua masa kepengurusan saya sebagai Ketua Jurusan Akuntansi. Terima kasih kepada Ali Djamhuri, PhD, Ak, Nurkholis, PhD (Cand.), Ak. dan Dr. (Kand.) Roekhudin, Ak., CSRS. yang telah banyak bekerja sama dengan saya dan kemudian sangat

berpengaruh dalam kelancaran karir saya sebagai dosen. Terima kasih kepada Prof. Dr. A. Erani Yustika, yang selalu mendorong saya untuk segera menyusulnya menjadi guru besar. Prof. Dr. Made Sudarma, Prof. Dr. Munawar Ismail dan Prof. Dr. Agus Suman yang sering berbagi motivasi kepada saya.

Terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr. Staf Penunjang Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun Universitas Brawijaya. Khususnya terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr. yang membantu penyiapan dan pengurusan dokumen pengajuan guru besar saya ini di bagian personalia. Juga terima kasih kepada staf penunjang akademik di Jurusan Akuntansi FEB-UB.

Terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada semua kolega sejawat yang belajar bersama di New Zealand pada tahun 2008 dan tentu saja para alumni S1 Akuntansi UB angkatan 1988, Alumni S2 Akuntansi UGM angkatan 1996 dan Alumni Program Doktor Ilmu Ekonomi UB angkatan 2001, serta Alumni SMA Negeri I Trenggalek.

Terima kasih kepada mahasiswa saya di semua Program Studi Akuntansi, baik S1, S2, S3 dan PPAk Universitas Brawijaya. Banyak hal yang saya petik sebagai pelajaran dari mereka ketika berinteraksi dan berbagi ilmu, di dalam maupun di luar kelas. Kematangan saya dalam menekuni bidang Etika Bisnis dan Profesi juga menguat karena adanya kesempatan untuk berinteraksi secara kontinyu dengan mereka. Hasil interaksi saya dengan mereka, di antaranya berbuah beberapa artikel yang dipublikasikan secara bersama, baik dipublikasikan pada jurnal ilmiah maupun seminar-seminar di bidang bisnis dan akuntansi.

Juga terima kasih kepada teman-teman di IAI dan IAI KAPd, yang telah banyak memberi ruang kepada saya untuk beraktifitas dan berbagi pengetahuan bersama. Terima kasih khususnya ke Prof. Dr. Ainun Na'im, Ak (Ketua Umum IAI KAPd 2006-2010, sekarang Sesjend. Kemdikbud), Dr. Khomsiyah, Ak (DPN IAI) dan Prof. M. Nasir, PhD, Ak (Ketua Umum IAI KAPd 2010-2012).

Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di komunitas Cendekiawan Insan Cita dan Lagzis Baitul Ummah. Khususnya terima kasih kepada Dr. Sasmito Djati, Prof. Dr. Nuhfil Hanani, Herman Suryokumoro, SH, MHum, Ir. Adam Wiryawan, MS, Dr. A.R. Faqih, Drs. Bambang Setyadin dan Prof. Dr. Sahri Muhammad. Terima kasih kepada Pengurus, Pengawas, Manajer dan Karyawan KPRI UB. Serta terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di komunitas Ikatan Keluarga Asal Trenggalek (IKAT) di Malang.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan tertinggi saya sampaikan kepada orang tua saya tercinta. Yang mulia Ibu Musrini, yang sekarang sudah menghadap Sang Khaliq. Beliau yang selalu menumbuhkan cinta kasih dan selalu mendidik kami untuk selalu bekerja keras, saling tolong dan menjaga solidaritas (*allahummafirlloha warhamha wa'afih wa'fu 'anha*). Yang saya hormati dan saya sayangi Bapak saya Likan Sasono, yang mendidik kami untuk menjadi insan-insan bijak dan cinta sesama. Nilai-nilai keguruan yang luar biasa tanamkan beliau kepada saya melalui *pitutur* dan *laku*-nya. Ibu Suparmiatun dan Bapak Tukidi yang selalu berbagi kasih sayang kepada saya sejak saya masih bayi. Bapak dan Ibu Mertua saya, Bapak Maul Baderi dan almarhum Ibu Rr. Soepranti (*allahummafirlloha warhamha wa'afih wa'fu 'anha*)

yang mengajarkan kepada kami tentang arti kesederhanaan dalam menjalani kehidupan. Ibu Wiji, yang sangat tulus melayani kami.

Tidak lupa terima kasih kepada Kakak dan Adik saya. Kepada Prita Rextiana, sebagai anak pertama yang memberi contoh kepada adik-adiknya untuk selalu belajar keras dan meraih prestasi tertinggi dalam tahapan akademiknya. Tentu dia tidak melupakan tulisan saya dibantal-gulingnya yang saat ini telah saya buktikan kebenarannya. Twina Riyadhin, yang “memilihkan” Akuntansi UB sebagai pilihan pertama saya ketika menempuh Sipenmaru 1988. Tentu dia akan menjadi guru yang baik bagi anak dan muridnya. Adik saya Josan Binawan, “*be the right man in your life guys.*” Terima kasih juga kepada Mas Haryanto, Mas Ali, Dik Wati, Dik Woro, Dik Arum dan saudara-saudara saya yang lain, serta para keponakan saya yang turut memotivasi dan membantu saya dalam melancarkan karir sebagai dosen.

Terakhir dan sangat penting untuk saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih dengan penuh kecintaan kepada istri saya Agustiningtyas Marini, yang selalu berusaha memahami keadaan saya dan menguatkan diri saya ketika menghadapi dan membantu memecahkan persoalan yang saya hadapi. Dia yang selalu mengingatkan saya untuk ikhlas menerima keadaan. Untuk anak-anak saya tercinta Hayu Iyaka Nastaina, Haqu Imaning Elmiani dan Tity Ilafi Nurmutaqi, yang selalu menyegarkan suasana hati saya. Mereka akan mencapai yang lebih hebat dari apa yang ayahnya capai saat ini. Pesan Ayah untuk kalian, “Jadilah kalian manusia hebat di mata Tuhan dengan berbuat terbaik untuk sesama kalian. Jaga keyakinan diri kalian dengan ilmu, peliharalah keyakinan

kalian dengan amal, dan wujudkan keyakinan kalian dalam kebaikan hidup sehari-hari agar menjadi rahmat bagi semesta.” Mohon maaf atas kehilafan saya dalam penyampaian pidato pengukuhan ini, semoga Allah SWT selalu merahmati kita semua.

Terima kasih,
Alhamdulillah wabillahitaufiq walhidayah,
Wassalamu’alaikum wr.wb.

Daftar Acuan

- Anggaran Dasar Ikatan Akuntan Indonesia 2010.
Akuntan Indonesia. 2011. Edisi Khusus Ulang Tahun IAI 23 Desember 2011.
Agustian, A.G. (2001). *ESQ: Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*. Penerbit Arga, Jakarta.
Asshiddiqie, J. (2011). *Membudayakan Nilai-nilai Pancasila dan Kaedah-kaedah Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945*. Makalah dalam Kongres Pancasila III. Surabaya 31 Mei-1 Juni.
Baker, C.F. (2005). What is The Meaning of “The Public Interest”? Examining The Ideology of The American Public Accounting Profession. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 18 No. 5; 690-703.
Bakre, O. M. (2008). Financial Reporting as Technology that Supports and Sustains Imperial Expansion, Maintenance and Control in The Colonial and Post-colonial Globalisation: The Case of The Jamaican Economy. *Critical Perspectives on Accounting* 19; 487–522.

- Capra, F. (2000). *Titik Balik Peradaban; Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*. Penerbit Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta dari *The Turning Point; Science Society and The Rising Culture*, diterbitkan oleh Bantam Book, New York.
- Cavanagh, G. (1999). Spirituality for Managers: Context and Critique. *Journal of Organizational Change Management*. Vol. 12 No. 3; 186-199.
- Clark. R. (2004). Religiousness, Spirituality, and IQ: Are They Linked? *Explorations: An Undergraduate Research Journal*; 35-46.
- Chwastiak, M. dan J.J. Young. (2003). Silences in Annual Reports. *Critical Perspectives on Accounting* 14; 533–552.
- Dwyer, P.D. dan A. Alon. (2008). In Whose Interests? An Examination of the Professional Ideology Revealed in the AICPA's State Cascade Project. *Accounting and the Public Interest*. Vol. 8; 77-93.
- Holenstein, A.M. (2005). *Role and Significance of Religion and Spirituality in Development Co-operation*. A Reflection and Working Paper. Swiss Agency for Development and Co-operation SDC, Freiburgstrasse 130.
- IFAC Ethics Committee. (2005). *Code of Ethics for Professional Accountants*.
- Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. 1998. Prosiding Kongres Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta, 23-25 September 1998; 301-306.
- Kode Etik Profesi Akuntan Publik. 2008. Diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia 2009.

- Knight, D. dan M. O’Leary. (2005). Reflecting on corporate scandals: the failure of ethical leadership. *Business Ethics: A European Review*; Volume 14 Number 4 October; 359-366.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Liyanarachchi, G.A. (2008). Ethics in Accounting: Exploring the Relevance of a Buddhist Perspective. *Accountancy Business and the Public Interest*, Vol. 7, No. 2, 2008; 118-148.
- Ludigdo, U. (2007). *Paradoks Etika Akuntan*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- (2010a). Spritualitas Islam dan Kepemimpinan Etis dalam Bisnis. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Vol. 8, No. 1, Pebruari; 275-283.
- (2010b). Memaknai Kepemimpinan Etis di Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi*. Vol. XIV/03/September/2010; 357-369.
- dan A. Kamayanti. (2012). *Pancasila as Accountant Ethics Imperialism Liberator*. Paper presented on International Seminar for Global Accounting, Finance and Economics. Melbourne, February 20-21.
- Oh, E.S., M. Chai dan E.F. Oh. 2004. *Secular or Religious? An Eclectic Ethical Governance Framework for Resolution of Accounting Dilemmas*. Paper Presented at the Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference. Singapore, 4-6 July.

- Pasiak, T. (2002). *Revolusi IQ/EQ/SQ: Antara Neurosains dan Al Qur'an*. Penerbit Mizan. Bandung.
- Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (2009). *Sistem Ekonomi Nasional*.
- Rodrigues, L.L. dan R. Craig. 2007. Assessing international Accounting Harmonization Using Hegelian Dialectic, Isomorphism and Foucault. *Critical Perspectives on Accounting* 18; 739–757.
- Roth, W.F. (2005). *Ethics in the Workplace; A Systems Perspective*. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
- Shaw, W.H., and V. Barry. (2007). *Moral Issues in Business*. Tenth Edition. Thompson Wadsworth, USA.
- Suseno, F.M. (2003). *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zohar, D. dan I. Marshall. (2007). *SQ: Kecerdasan Spiritual*. Penerbit Mizan, Bandung.

RIWAYAT HIDUP

N a m a : Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak
Tempat/Tgl. Lahir : Trenggalek/14 Agustus 1969
Agama : Islam
N I P : 19690814 199402 1 001
Jabatan Akademik : Guru Besar
Pangkat/Golongan : Pembina/Iva
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya,
Jl. MT Haryono 165 Malang
Telepon: 0341-551396
Alamat Rumah : Jl. Dewandaru Dalam 20-A Malang
Telepon: 0341-478483
Alamat e-mail : untiludigdo@ub.ac.id;
unti_ludigdo@yahoo.com
Ayah : Likan Sasono
Ibu : Musrini (alm)
Istri : Agustiningtyas Marini, S.Hut.
Anak : 1. Hayu Iyaka Nastaina
2. Haqu Imaning Elmiani
3. Tity Ilafi Nurmutaqi

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Jati III, Karanganyar, Trenggalek, lulus 1982.
2. SMP Negeri Karanganyar, Trenggalek, lulus 1985.
3. SMA Negeri I Trenggalek, lulus 1988.
4. Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, lulus 1993.
5. Program Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjahmada, lulus 1998.
6. Program Doktor Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Brawijaya, lulus 2005.

Riwayat Jabatan Akademik:

1. Calon Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai 1 Februari 1994.
2. Asisten Ahli Madya, terhitung mulai 1 Maret 1996.
3. Asisten Ahli, terhitung mulai 1 Februari 1999.
4. Lektor, terhitung mulai 1 Agustus 2001.
5. Lektor Kepala, terhitung mulai 1 Agustus 2006.
6. Guru Besar, terhitung mulai 1 Januari 2012.

Riwayat Pekerjaan:

1. Dosen FE/FEB Univ. Brawijaya, 1994 – sekarang.
2. Sekretaris Pusat Sistem Informasi Manajemen dan Perencanaan FE Univ. Brawijaya, 1998-2000.
3. Wakil Ketua Penyunting Majalah Ilmiah FE Univ. Brawijaya “Lintasan Ekonomi”, 2000-2005.
4. Anggota Senat Wakil Dosen FE Univ. Brawijaya, 2003-2007.
5. Anggota Senat *ex officio* Ketua Jurusan FE Univ. Brawijaya, 2007-2013.

6. Ketua Badan Pengembangan Sistem Informasi FE Univ. Brawijaya 2005-2007.
7. Direktur PHK A-3 Akuntansi FE Univ. Brawijaya 2006-2007.
8. Anggota Pusat Jaminan Mutu Univ. Brawijaya, 2005-2008.
9. Bendahara KPRI Univ. Brawijaya, 2001-2004.
10. Ketua KPRI Univ. Brawijaya, 2007-2010 dan 2010-2013.
11. Ketua Jurusan Akuntansi FE/FEB Univ. Brawijaya, 2007-2009 dan 2009-2013.
12. Penanggung jawab Jurnal Akuntansi Multiparadigma, sejak 2010.
13. Dosen Luar Biasa pada PS-S1 Akuntansi dan PPS Univ. Muhammadiyah Malang, 1994-2007.
14. Dosen Luar Biasa pada PS-S1 Universitas Islam Malang, 1995-2000.

Tanda Penghargaan:

1. Nominator 10 Besar Makalah Terbaik pada Lomba Karya Tulis Konvensi Nasional Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2000.
2. Lulus dengan Predikat *Cumlaude* pada Program Doktor PPS-Univ. Brawijaya tahun 2005.
3. Dosen Berprestasi I Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 2005.
4. Dosen Berprestasi IV Universitas Brawijaya tahun 2005.
5. Pemakalah Terbaik I dalam Konferensi Nasional Akuntansi tentang *Good Governance* FE-Univ. Trisakti tahun 2005.

6. Ketua Program Studi/Ketua Jurusan Berprestasi I Universitas Brawijaya tahun 2010.
7. Peserta Ketua Program Studi/Ketua Jurusan Berprestasi Nasional oleh Ditjen Dikti Kemendiknas tahun 2010.
8. Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden RI tahun 2010.

Penelitian dan Publikasi Ilmiah:

1. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Akuntabilitas Koperasi. Kerjasama Riset dengan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan FE-UB. 2000.
2. Pengembangan *Good Governance* di FE-UB. DPP-FE-UB. 2002.
3. Penyusunan Formulasi Alokasi Dana Desa. Kerjasama Riset dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia. 2002.
4. Survei tentang Eksistensi *Teaching Anxiety* di Kalangan Dosen Akuntansi. Riset DPP FE-UB. 2004.
5. Pemahaman Strukturasi atas Praktik Etika di KAP. Mandiri. 2005.
6. Studi Penelusuran Alumni Akuntansi UB. Riset DPP FE-UB. 2007.
7. Studi Penelusuran Alumni dan Pengguna Lulusan Akuntansi UB. Riset DPP FE-UB. 2009.
8. Pendidikan Akuntansi Berbasis *IESQ* untuk Mengembangkan Perilaku Etis Akuntan. Majalah Ilmiah Lintasan Ekonomi. 2005.
9. Penanganan *Moral Hazard* di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan

- Pajak. Co-author. *Jurnal TEMA*. Vol. 9, Maret 2007. Terakreditasi No. 56/Dikti/Kep/2005.
10. Makna Uang dalam Konstruksi Kesadaran Etis Akuntan. *Jurnal TEMA*. Vol. 9, Maret 2007. Terakreditasi. No. 56/Dikti/Kep/2005.
 11. Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Emosional dan Spiritual terhadap Sikap Etis Mahasiswa Akuntansi. Co-author. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*. Vol.8, No. 1, Pebruari 2008. Terakreditasi No. 56/Dikti/Kep/2005.
 12. Etika Dalam Rangkap Profesi Akuntan Pendidik. *Majalah Akuntan Indonesia*. Edisi No.9/II/Juni 2008.
 13. Wacana dan Praksis Etika di Kantor Akuntan Publik dalam Strukturasi (+SQ) *Jurnal EKUITAS*. Terakreditasi No. 55a/Dikti/Kep/2006. Edisi Maret 2009.
 14. Spiritualitas Islam dan Kepemimpinan Etis dalam Bisnis *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Terakreditasi No. 43/Dikti/Kep/2008. Edisi Maret 2010.
 15. Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual dan Budaya Organisasi terhadap Perilaku Etis Auditor pada KAP. Co Author. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 1 No. 1, April 2010.
 16. Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Akuntan Pendidik di Jurusan Akuntansi. Co Author. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 1, No. 2, Agustus 2010.
 17. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor pada Akantor Akuntan Publik di Malang dan Surabaya. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 1, No. 2, Agustus 2010.

18. Memaknai Kepemimpinan Etis di Kantor Akuntan Publik: Perspektif Rukun Islam. *Jurnal Akuntansi*. Terakreditasi No. 83/Dikti/Kep/2009 Vol. XIV/03/September/2010.
19. Metamorfosis Kesadaran Etis Holistik Mahasiswa Akuntansi. Co Author. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 1, No. 3, Desember 2010.
20. Qualitative Approach To Build The Concept of Social Responsibility Disclosures Based On Shari'ah Enterprise Theory. Co Author. Master of Business Administration, Akademia Leona Kozminskiego, Warszawa, Polandia. 6 (115) 2010.
21. Studi Etnografi Akuntabilitas Spiritual pada Organisasi Gereja Katolik yang Terinkulturasi Budaya Lokal. Co. Author. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 2, No. 1, April 2011.
22. Desentralisasi dan Tata Pemerintahan Desa. Co-Author. LPEM FE-Unibraw. 2002 (Buku: ISBN 979-3321-00-8).
23. Penguatan Keuangan Desa dan Perekonomian Desa. Co-Author. Focal Point SPOD FE-UB (Buku: ISBN 979-25-86111-32006).
24. Paradoks Etika Akuntan. 2007. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta (Buku: ISBN 978-979-1277-66-2).

Presentasi pada Seminar/Lokakarya/Pertemuan Ilmiah:

1. Sebuah Perspektif dalam Pembelajaran Manajemen Koperasi Madrasah. LP2S Jawa Timur. 2005.
2. Mengembangkan Etika di KAP. Panitia Konferensi Nasional Akuntansi di FE Univ. Trisakti. 2005

3. Kerangka Metodologi Dalam Memahami Praktik Etika Di Kantor Akuntan Publik. Panitia The 2nd Postgraduate Consorsium on Accounting. 2006.
4. Strukturasi Praktik Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Studi Interpretif. Simposium Nasional Akuntansi IX di Padang. 2006.
5. Studi Fenomenologis terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah. Co Author pada Simposium Nasional Akuntansi X di Makassar. 2007.
6. Gagasan Pengembangan Manajemen dan Akuntansi ZIS. Kanwil Depag Jatim pada Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) BAZ Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Nopember 2007.
7. Penggalian Bahan dan Penemuan Alur Cerita: Dua Episode Proses Dalam (Sebuah) Pentas Riset Kualitatif Non-Positivistik Panitia The 3rd Postgraduate Consorsium on Accounting (PPS Akuntansi-UB) 2008.
8. Etika Profesi: Tidak Cukup *hanya* Dinyatakan, tetapi harus Dijalankan. Jurusan Akuntansi FE-Univ. Trisakti 2008.
9. Konvergensi IFRS dan Implikasinya pada Pendidikan Akuntansi. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi FE-Unej. 2009.
10. Agenda Riset Akuntansi di Indonesia: Perspektif Non-Mainstream. Asosiasi Program Studi Akuntansi PT Muhammadiyah di UMM. 2009.
11. Model Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Integrasi Bidang Akuntansi. FE Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2009.

12. Metodologi Penelitian Interpretif. Jurusan Akuntansi FE Univ. Trunojoyo. 2009.
13. Hati Nurani dan Ilmu Hidup sebagai Pembebas Pendidikan Akuntansi Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi ke-12 di Palembang, 4-6 Oktober 2009.
14. Kode Etik Akuntan: Pengembangan dan Penegakannya. Kuliah Tamu di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, 19 Mei 2010.
15. Peran Akuntan dalam Mewujudkan *Good Governance* Seminar Nasional di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, 20 Mei 2010.
16. Metamorfosis Kesadaran Etis Holistik Mahasiswa Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi ke-13 di Univ. Jenderal Soedirman Purwokerto (co author). 2010.
17. Refleksi dan *Sharing* Pengalaman dalam Rekonstruksi Kurikulum Akuntansi. Forum Dekan di FEB Univ. Hasanuddin Makassar. 2011.
18. *Pancasila as Accountant Ethics Imperialism Liberator*. Paper presented on International Seminar for Global Accounting, Finance and Economics. Melbourne-Australia, February 20-21, 2012.

Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Penyusunan Sistem Akuntansi P2KP Wilayah Tulungagung & Trenggalek. LPM Univ. Brawijaya. 2003.
2. Pelatihan Akuntansi dalam Pengelolaan BUMDes di Kab. Trenggalek. Pemkab. Trenggalek. 2004.
3. Konsultansi Pembentukan BUMDes di Kabupaten Lumajang. PP-Otoda. 2004.

4. Konsultansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mlinjon Kec. Suruh Kab. Trenggalek. PP-Otoda FH UB. 2004.
5. Konsultansi Pengelolaan Dana Desa dalam BUMDes di Desa Gesikhardjo Kab. Tuban. PP-Otoda. 2004.
6. Konsultasi Publik atas Rancangan Undang-undang BPK-RI. Oleh Sekretariat DPR-RI dan UB. 2005.
7. Kursus Keuangan Daerah. Pusat Pengkajian Keuangan Daerah FE-UB. 2007 dan 2008.
8. Pendidikan dan Pelatihan Audit untuk PNS di lingkungan Inspektorat Daerah. STAR-SDP dan FE-UB. 2008.
9. Workshop Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik oleh Sekretariat DPRD Kaltim. 2009 dan 2011.
10. Konsultasi Publik atas Rancangan Undang-undang Akuntan Publik oleh DPD-RI. 2010.
11. Konsultasi untuk Evaluasi Undang-undang Akuntan Publik oleh DPD-RI. 2011.

Keterlibatan dalam Organisasi Profesi:

1. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 1994- sekarang.
2. Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 1994-sekarang.
3. Koordinator IAI KAPd Jawa Timur, 2006-2008 dan 2008-2010.
4. Ketua Bidang Pendidikan IAI KAPd, 2010-2012.
5. Anggota Komite Etika IAI, 2007-2010 dan 2010-2013.
6. Anggota The International Association for Accounting Education & Research (IAAER) 2011- sekarang.
7. Asesor Akreditasi BAN-PT 2007- sekarang.
8. Anggota Dewan Editor Jurnal Riset Akuntansi Indonesia 2008-sekarang.

Kunjungan ke Luar Negeri:

1. Malaysia. *Benchmarking* dan Inisiatif Kerjasama dengan International Islamic University of Malaysia, Juli 2005.
2. Arab Saudi. Ibadah Haji. Januari-Pebruari 2006.
3. New Zealand. *Homestay and Short-course Improving English Competency for Teaching in English Class Program*, Massey University at Wellington, Juli-September 2008.
4. Australia. Inisiasi Kerjasama dengan University of Wollongong, University of Canberra, University of Sidney dan University of Melbourne, September 2010.
5. Malaysia. *World Congress of Accountant 2010 di Kuala Lumpur*. Desember 2010.
6. Malaysia. *Academic Visit*. Faculty of Management dan Faculty of Social Science Universiti Sains Malaysia Penang. 14 Nopember 2011.
7. Thailand. *Academic Visit*. Faculty of Management University of Prince Songkla Hatyai. 15 Nopember 2011.
8. Jepang. *Academic Visit for Head of Department*. ke University of Hiroshima. 20-26 Nopember 2011.
9. Australia. *International Seminar on Global Accounting, Finance and Economics*. Melbourne, 20-21 Pebruari 2012.